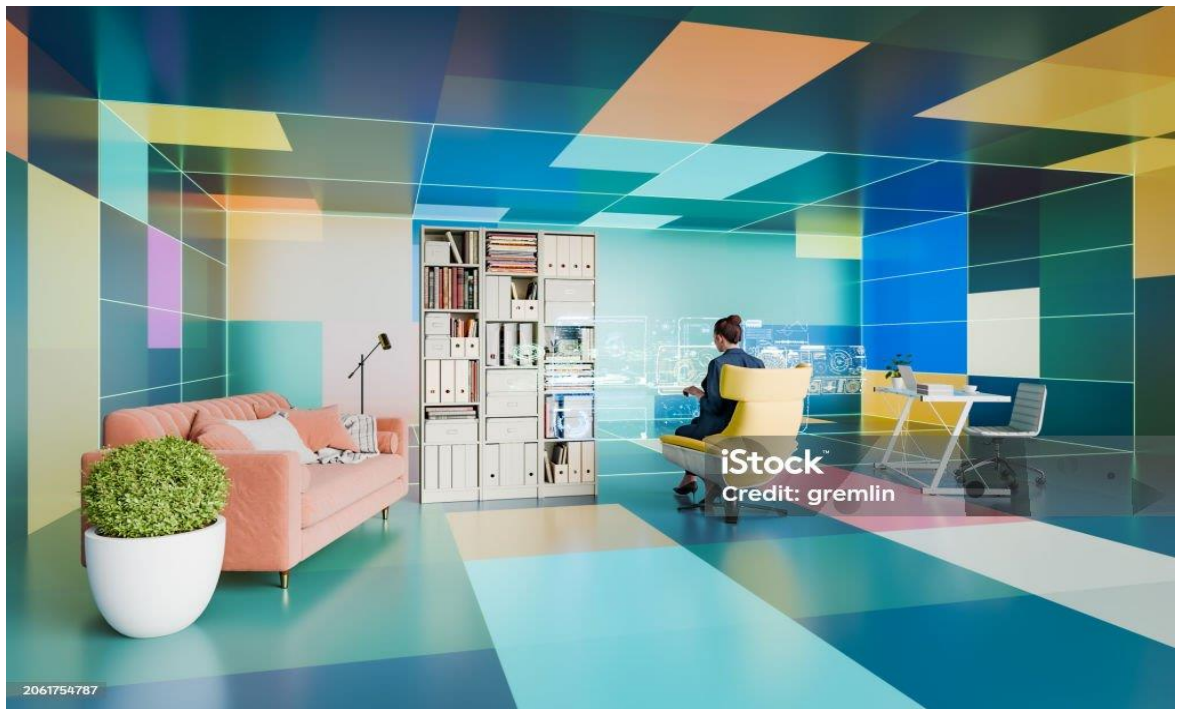


**RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL
KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga dapat menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Tahun 2026.

Rancangan Akhir Rencana Kerja ini merupakan kerangka acuan pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Sosial Tahun 2026 bagi para pengelola di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Dengan disusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara umum kegiatan Pembangunan Bidang Sosial sebagai tahapan kegiatan dalam kerangka mewujudkan Visi Kabupaten Mojokerto yaitu ***“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil dan Makmur”***.

Dengan segala kerendahan hati, kami menyadari penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Sosial ini masih banyak kekurangan. Berkenaan dengan hal tersebut, kami berharap saran dan masukan untuk penyempurnaan selanjutnya.

Mojokerto, Juli 2025

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Mojokerto



Try Raharjo Murdianto, S.STP., M.AP.
Pembina Tk. I
NIP. 19870519 200602 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat DAerah	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	32
2.3 Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	38
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	39
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..	84
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	86
3.1 Visi dan Misi	86
3.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	87
3.3 Tujuan dan Sasaran Ranja Perangkat Daerah	87
3.4 Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	90
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	104
BAB V. PENUTUP.....	130
Lampiran- lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, setiap Perangkat Daerah diharuskan untuk menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai acuan perencanaan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah ini mengacu pada Rencana Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah, Renstra Perangkat Daerah, serta hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan dan sub. kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi acuan perumusan program, kegiatan, sub. kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah, sesuai dengan rencana program prioritas pada Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah sedangkan Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun ke dalam Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah, selaras dengan Renstra Perangkat Daerah. Hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub. kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra Perangkat Daerah berdasarkan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi

Perangkat Daerah. Usulan program, kegiatan serta sub. kegiatan yang berasal dari masyarakat menjadi acuan perumusan kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dibahas pada forum Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Bappeda, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program, kegiatan dan sub. kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan usulan program, kegiatan dan sub. kegiatan hasil musrenbang kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program, kegiatan dan sub. kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, penyelarasan program, kegiatan dan sub. kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, penyesuaian pendanaan program, kegiatan dan sub. kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah. Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang dikoordinir oleh Bappeda. Kemudian Renja tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun $n+1$.

Sebagai dokumen perencanaan, Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program kerja prioritas, kegiatan pembangunan, sub kegiatan beserta pendanaannya sehingga tercipta keselarasan dalam rangka pembangunan Daerah. Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan tugas, pokok dan fungsi organisasi disusun berdasarkan prinsip-prinsip :

1. Mengacu pada Rancangan Awal Perangkat Daerah tahun yang bersangkutan, yang digunakan untuk merumuskan program, kegiatan, sub. kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif;

2. Mengacu pada Renstra Perangkat Daerah sebagai acuan penetapan tujuan, sasaran kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan dan prakiraan maju tahun berikutnya;
3. Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub. kegiatan periode sebelumnya sebagai landasan perumusan kegiatan alternative untuk mencapai sasaran Renstra Perangkat Daerah berdasarkan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya;
4. Sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang dihadapi, perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah serta dapat menjawab berbagai isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten Mojokerto juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 peraturan Tentang mengadakan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 dari hal pembentukan Kabupaten Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
22. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021 - 2025;
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
24. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
25. Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
26. Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasai upaya pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun

- 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran Daerah Tahunan;
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor : 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025;
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2010 Nomor 3);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektotorat, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2010 Nomor 3);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1).
44. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto 2021-2026;
45. Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 44 Tahun 2021 tentang Rencana Srtategik (RENSTRA) Kabupaten Mojokerto.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

Maksud

- a. Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun program, kegiatan dan sub. kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- b. Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menentukan lokasi kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- c. Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- d. Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.

Tujuan

- a. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program, kegiatan dan sub. kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 tahun yang tersusun dalam rencana.

- b. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/kegiatan selama 1 tahun oleh Perangkat Daerah.
- c. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah-langkah/kebijakan tugas-tugas sesuai dengan kewenangannya.
- e. Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

Berisi mengenai latar belakang penyusunan rencana kerja, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan.

BAB II. Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan tahun lalu (tahun $n-2$) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun $n-1$).

BAB III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berisi ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas

dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V. Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA

PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2026-2030 adalah sebagai berikut :

RPJMD		Renstra	
Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
Menurunkan angka kemiskinan	Menurunnya Beban Pengeluaran Keluarga Miskin dan Rentan	Meningkatnya kesejahteraan sosial	Meningkatnya PPKS yang Mandiri

Adapun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto mempunyai kinerja lainnya yang tertuang di dalam Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

No.	Kinerja Lainnya	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	1.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,50 (Nilai)

		1.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	96,10 %
		1.3	Indeks Profesionalitas ASN	81 (Tinggi)
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		3

Dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto didukung oleh 6 (enam) program 12 (dua belas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan.

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 sebagaimana yang tertuang di dalam Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja program Persentase Capaian Kinerja Program, terdiri dari 5 (lima) Kegiatan dan 12 (dua belas) Sub Kegiatan.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah kinerja lainnya yang tertuang di dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial, dengan uraian sebagai berikut :

- a) Meningkatkan Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel, dengan indikator kinerja :
 - Nilai SAKIP Perangkat Daerah;
 - Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah;
 - Indeks Profesionalitas ASN.
 - b) Optimalisasi kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah, dengan indikator kinerja :
 - Jumlah Inovasi Yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi.
2. Program Pemberdayaan Sosial dengan indikator kinerja program :
- a) Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial aktif, terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan dengan sasaran kegiatan yaitu Meningkatkan Kapasitas PSKS.
 - b) Persentase PPKS yang mendapatkan layanan pemberdayaan sosial, terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan dengan sasaran kegiatan yaitu Meningkatkan Pengembangan Usaha Bagi PPKS.
- Program Pemberdayaan Sosial tersebut Mendukung **Program Bupati PEDULI PPKS dan MILENIAL KREATIF.**
3. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial dengan indikator kinerja program :
- a) Persentase Desa yang updating SIKS-NG, terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan dengan sasaran kegiatan yaitu Meningkatkan akurasi data kesejahteraan sosial.

- b) Persentase Penerima bansos yang memiliki embrio usaha, terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan dengan sasaran kegiatan yaitu Meningkatnya kualitas kemandirian PPKS.

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial tersebut Mendukung ***Program Bupati PEDULI PPKS, PEREMPUAN BERKARYA, dan GERCEP STUNTING.***

- 4. Program Penanganan Bencana dengan indikator kinerja program :

- a) Persentase kejadian bencana yang ditangani sesuai standar tanggap darurat, terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan dengan sasaran kegiatan yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan korban bencana.

- b) Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial aktif, terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan dengan sasaran kegiatan yaitu Meningkatnya Kapasitas PSKS.

Program Penanganan Bencana tersebut ***Mendukung SPM dan Program Bupati PEDULI PPKS.***

- 5. Program Rehabilitasi Sosial dengan indikator kinerja program :

- a) Persentase PPKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial yang sesuai standar, terdiri dari 2 (dua) Kegiatan dan 11 (sebelas) Sub Kegiatan dengan sasaran kegiatan yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan rehabilitasi sosial.

Program Rehabilitasi Sosial tersebut ***Mendukung SPM dan Program Bupati PEDULI PPKS.***

6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan indikator kinerja program Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik, terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan.

Hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub. kegiatan Tahun 2025, yang terdiri dari 6 program 12 kegiatan dan 34 sub kegiatan dengan hasil capaian realisasi anggaran triwulan II sebesar 11,73%, dan capaian kinerja sebesar 50%.

Capaian Renstra Dinas Sosial pada Tahun 2025 masih belum bisa tercapai secara keseluruhan mengingat saat ini masih menginjak pada triwulan II. Adapun capaian program dan kegiatan Tahun 2025 sampai dengan triwulan II berdasarkan realisasi kinerja dan anggaran adalah sebagai berikut :

1. Sasaran strategis 1 : ***“Meningkatnya PPKS yang mandiri”*** dengan indikator kinerja ***Persentase PPKS yang mandiri***, Tahun 2025 target sasaran 0,019% terealisasi sebesar 0,010% dan tingkat capaian sebesar 50%.

Perhitungan rata-rata capaian sebesar 50% diperoleh dari formulasi Jumlah PPKS yang mandiri dibagi Jumlah PPKS kali 100%.

Sedangkan untuk anggaran yang mendukung indikator kinerja utama sebesar Rp. 19.977.856.367,- dan terserap sebesar Rp. 853.807.000,- atau 4,27%.

2. Kinerja lainnya yaitu 1 : ***“Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel”*** dengan indikator kinerja :

- 1) **Nilai SAKIP Perangkat Daerah**, realisasi Tahun 2025 sebesar 40,53 dan tingkat capaiannya sebesar 50% dari target 81,05. Nilai tersebut berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi dari Dinas Sosial.
- 2) **Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah**, realisasi Tahun 2025 sebesar 11,73% dan tingkat capaiannya sebesar 50% dari target 96,10%. Berdasarkan laporan realisasi anggaran Dinas Sosial.
- 3) **Indeks Profesionalitas ASN**, realisasi Tahun 2025 sebesar 40,50 dan tingkat capaiannya sebesar 50% dari target 81. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi dari Dinas Sosial.

Kinerja lainnya yaitu 2 : “**Optimalisasi kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah**” dengan indikator **Jumlah Inovasi Yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi serta Berkelanjutan**, realisasi Tahun 2025 sebanyak 3 dan tingkat capaiannya sebesar 100%. Berdasarkan Laporan Inovasi Dinas Sosial.

Sedangkan untuk anggaran yang mendukung indikator kinerja lainnya sebesar Rp. 5.600.803.140,- dan terserap sebesar Rp. 2.147.654.094,- atau 38,35%.

Adapun uraiannya adalah sebagai berikut :

1.) **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Pencapaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah Persentase Capaian Kinerja Program, dengan realisasi anggaran sebesar 38,35% dan capaian kinerja 50%.

Kegiatan :

- a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Dengan indikator kinerja kegiatan Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun, anggaran terealisasi 40,17% dan capaian kinerja 50%.

Sub. Kegiatan :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Indikator kinerja sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, anggaran terealisasi 48,74% dengan capaian kinerja 50%.

- 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Indikator kinerja sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, anggaran terealisasi 31,67% dengan capaian kinerja 50%.

Kegiatan :

- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dengan indikator kinerja kegiatan Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah, anggaran terealisasi 17,57% dan capaian kinerja 50%.

Sub. Kegiatan :

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN, anggaran terealisasi 17,57% dengan capaian kinerja 50%.

Kegiatan :

- c) **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 Dengan indikator kinerja kegiatan Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan, anggaran terealisasi 38,22% dan capaian kinerja 50%.

Sub. Kegiatan :

- 1) **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**
 Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan, anggaran terealisasi 36,90% dengan capaian kinerja 50%.
- 2) **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**
 Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan, anggaran terealisasi 40,66% dengan capaian kinerja 50%.

Kegiatan :

- d) **Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 Dengan indikator kinerja kegiatan Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan anggaran terealisasi 6,78% dan capaian kinerja 50%.

Sub. Kegiatan :

- 1) **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**
 Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan, anggaran terealisasi 0% dengan capaian kinerja 50%.
- 2) **Penyediaan Bahan Logistik Kantor**

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan, anggaran terealisasi 0% dengan capaian kinerja 50%.

3) Penyediaan Bahan/Material

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Bahan/Material adalah Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan, anggaran terealisasi 0% dengan capaian kinerja 50%.

4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan adalah Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan, anggaran terealisasi 16,04% dengan capaian kinerja 50%.

5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator kinerja sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, anggaran terealisasi 48,65% dengan capaian kinerja 50%.

Kegiatan :

e) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan indikator kinerja kegiatan Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik, anggaran terealisasi 17,57% dan capaian kinerja 50%

Sub. Kegiatan :

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan adalah Jumlah

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya, anggaran terealisasi 21,90% dengan capaian kinerja 50%.

2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator kinerja sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya adalah Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi, anggaran terealisasi 8,75% dengan capaian kinerja 50%.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tersebut digunakan untuk mendukung kinerja lainnya pada Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 5 (lima) kegiatan dan 12 (dua belas) sub kegiatan.

Dengan anggaran Rp. 5.600.803.140,- dan terserap sebesar Rp. 2.147.645.094,- atau 38,35% dengan capaian kinerja 50%.

2.) Program Pemberdayaan Sosial

2.1. Pencapaian kinerja Program Pemberdayaan Sosial yang pertama adalah Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial aktif, dengan realisasi anggaran sebesar 17,16% dan capaian kinerja 50%.

Kegiatan :

- a) Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.

Pencapaian indikator Kinerja kegiatan ini adalah Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang

mendapatkan sertifikat, anggaran terealisasi 38,37% dan capaian kinerja 50%.

Sub. Kegiatan :

- 1) Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator kinerja sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota adalah Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota, anggaran terealisasi 0% dengan capaian kinerja 50%;

- 2) Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator kinerja sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota adalah Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota, anggaran terealisasi 39,75% dengan capaian kinerja 50%;

- 2.2. Dan pencapaian kinerja Program Pemberdayaan Sosial yang kedua adalah Persentase PPKS yang mendapatkan layanan pemberdayaan sosial, dengan realisasi anggaran sebesar 0% dan capaian kinerja 50%.

Kegiatan :

- b) Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.

Pencapaian indikator Kinerja kegiatan ini adalah Persentase PPKS yang mendapatkan fasilitasi

pengembangan usaha, anggaran terealisasi 0% dan capaian kinerja 50%.

Sub. Kegiatan :

- 1) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
Indikator kinerja sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota adalah Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota, anggaran terealisasi 0% dengan capaian kinerja 50%.

Pada Program Pemberdayaan Sosial tersebut digunakan untuk pemberdayaan/pembinaan bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yaitu Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Lembaga. Program Pemberdayaan Sosial ini mendukung ***Program Unggulan Bupati Peduli PPKS dan Milenial Kreatif***.

Dengan total anggaran Program Pemberdayaan Sosial sebesar Rp. 262.275.000,- terserap Rp. 45.000.000,- atau 17,16% dengan capaian kinerja 50%.

3.) Program Rehabilitasi Sosial

Pencapaian kinerja program rehabilitasi sosial adalah Persentase PPKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial yang sesuai standar, dengan anggaran tersealisasi 44,59% dan capaian kinerja 50%.

Kegiatan:

- a) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.

Pencapaian indikator Kinerja kegiatan ini adalah Persentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial, anggaran terealisasi 40,41% dan capaian kinerja 50%.

Sub. Kegiatan :

- 1) Penyediaan Permakanan

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Permakanan adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota, anggaran terealisasi 43,86% dengan capaian kinerja 50%;

- 2) Penyediaan Sandang

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Sandang adalah Jumlah Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten / Kota, anggaran terealisasi 1,19% dengan capaian kinerja 50%;

- 3) Penyediaan Alat Bantu

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Alat Bantu adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota, anggaran terealisasi 72,14% dengan capaian kinerja 100%;

- 4) Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga

Indikator kinerja sub kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota, anggaran terealisasi 26,00% dengan capaian kinerja 50%;

- 5) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

Indikator kinerja sub kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial adalah Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota, anggaran terealisasi 40,18% dengan capaian kinerja 50%;

- 6) Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat

Indikator kinerja sub kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat adalah Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota, anggaran terealisasi 0% dengan capaian kinerja 50%;

- 7) Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

Indikator kinerja sub kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten / Kota, anggaran terealisasi 50,00% dengan capaian kinerja 50%;

- 8) Pemberian Layanan Data dan Pengaduan

Indikator kinerja sub kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota, anggaran terealisasi 18,00% dengan capaian kinerja 25%;

- 9) Pemberian Layanan Kedaruratan

Indikator kinerja sub kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan

Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten / Kota, anggaran terealisasi 38% dengan capaian kinerja 50%.

Kegiatan:

- b) Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.

Pencapaian indikator Kinerja kegiatan ini adalah Persentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial, anggaran terealisasi 78,66% dan capaian kinerja 85%.

Sub. Kegiatan :

- 1) Penyediaan Permakanan

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Permakanan adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota, anggaran terealisasi 79,49% dengan capaian kinerja 100%;

- 2) Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak

Indikator kinerja sub kegiatan Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak adalah Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten / Kota, anggaran terealisasi 33,33% dengan capaian kinerja 50%;

Pada Program Rehabilitasi Sosial tersebut digunakan untuk mendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM). Program Rehabilitasi Sosial ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yaitu kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dan kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial. Yang mana pada kegiatan pertama ada 9 (sembilan) sub kegiatan sedangkan pada kegiatan kedua ada 2 (dua) sub kegiatan. Program Rehabilitasi Sosial ini mendukung **Program Unggulan Bupati Peduli PPKS (Anak Terlantar dan Lansia Terlantar, Penyandang Disabilitas, dan Kelompok Minoritas).**

Dengan total anggaran Program Rehabilitasi Sosial sebesar Rp. 1.525.137.467,- terserap Rp. 680.131.000,- atau 44,59% dengan capaian kinerja 85%.

4.) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

4.1. Pencapaian kinerja Program Perlindungan dan Jaminan Sosial yang pertama adalah Persentase Desa yang updating SIKS-NG, dengan anggaran terealisasi 1,20% dan capaian kinerja 50%.

Kegiatan :

- a) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.

Pada kegiatan ini ada dua indikator kinerja, pencapaian indikator Kinerja kegiatan yang pertama adalah Persentase Data kesejahteraan sosial yang terverifikasi dan tervalidasi sesuai standar, anggaran terealisasi 1,16% dan capaian kinerja 50%.

Sub. Kegiatan :

- 1) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja sub kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota adalah Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan

Fakir Miskin Kabupaten/Kota, anggaran terealisasi 39,80% dengan capaian kinerja 50%;

- 2) Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dengan pencapaian indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota, terealisasi 0,80% dengan capaian kinerja 50%.

4.2. Sedangkan pencapaian kinerja Program Perlindungan dan Jaminan Sosial yang kedua adalah Persentase Penerima bansos yang memiliki embrio usaha, dengan anggaran terealisasi 9,80% dan capaian kinerja 50%.

Kegiatan :

- a) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.

Pada pencapaian indikator Kinerja kegiatan yang kedua adalah Persentase PPKS yang berwirausaha mandiri, anggaran terealisasi 9,80% dan capaian kinerja 50%.

Sub. Kegiatan :

- 1) Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Indikator kinerja sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota, terealisasi 9,80% dengan capaian kinerja 50%.

Pada Program Perlindungan dan Jaminan Sosial tersebut digunakan untuk Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Tujuan DBHCHT adalah : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Mendukung kesehatan, Pengembangan ekonomi, Pengawasan produksi dan peredaran tembakau. Program Perlindungan dan

Jaminan Sosial terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan 2 (dua) indikator kinerja kegiatan, pada kegiatan yang pertama ada 2 (dua) sub kegiatan sedangkan pada indikator kinerja kegiatan yang kedua ada 1 (satu) sub kegiatan. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial ini mendukung ***Program Unggulan Bupati Perempuan Berkarya, Gercep Stunting dan Peduli PPKS (Masyarakat Miskin, Disabilitas Dan Lansia).***

Dengan total anggaran Program Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar Rp. 18.087.484.400,- terserap Rp. 115.496.000,- atau 1,20% dengan capaian kinerja 50%.

Anggaran Rp. 18.087.484.400,- tersebut digunakan untuk :

1.	DBHCHT	: Rp. 9.295.743.700,-
2.	PKH	: Rp. 152.000.000,-
3.	SEMPAKO/BPNT	: Rp. 4.487.700,-
4.	Pendataan DTKS	: Rp. 75.354.100,-
5.	Pendataan PPKS	: Rp. 12.732.900,-
6.	PKH Banmas	: Rp. 47.780.000,-
7.	Fasilitasi Sekolah Rakyat	: Rp. 8.500.000.000,-

5.) Program Penanganan Bencana

5.1. Pencapaian kinerja Program Penanganan Bencana yang pertama adalah Persentase kejadian bencana yang ditangani sesuai standar tanggap darurat, dengan anggaran terealisasi 10,89% dan capaian kinerja 50%.

Kegiatan :

- a) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

Pencapaian indikator Kinerja kegiatan ini adalah Persentase PPKS korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya

pada masa bencana sesuai standar, anggaran terealisasi 8,24% dan capaian kinerja 50%.

Sub. Kegiatan :

1) Penyediaan Makanan

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Makanan adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota, anggaran terealisasi 6,37% dengan capaian kinerja 50%;

2) Penyediaan Sandang

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Sandang adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia Pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota, anggaran terealisasi 12,08% dengan capaian kinerja 56%;

3) Pelayanan Dukungan Psikososial

Indikator kinerja sub kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial adalah Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/ Kota, anggaran terealisasi 56,00% dengan capaian kinerja 57,20%.

5.2. Pencapaian kinerja Program Penanganan Bencana yang kedua adalah Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial aktif, dengan anggaran terealisasi 28,32% dan capaian kinerja 50%.

Kegiatan :

- b) Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota.

Pencapaian indikator Kinerja kegiatan ini adalah Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan sertifikat, anggaran terealisasi 28,32% dan capaian kinerja 50%.

Sub. Kegiatan :

- 1) Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

Indikator kinerja sub kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana adalah Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana, anggaran terealisasi 28,32% dengan capaian kinerja 50%.

Pada Program Penanganan Bencana tersebut digunakan untuk mendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM). Program Penanganan Bencana ini terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja program. Pada indikator kinerja program yang pertama ada 1 (satu) kegiatan, yaitu kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota dengan 3 (tiga) sub kegiatan. Sedangkan pada indikator kinerja program yang kedua ada kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota dengan 1 (satu) sub kegiatan. Tujuan dari Program Penanganan Bencana adalah untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana, mengurangi resiko bencana, dan meminimalkan dampak bencana. Program Penanganan Bencana tersebut ***Mendukung SPM dan Program Bupati PEDULI PPKS.***

Dengan total anggaran Program Penanganan Bencana sebesar Rp. 93.459.500,- terserap Rp. 10.180.000,- atau 10,89% dengan capaian kinerja 65%.

6.) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Sasaran dari Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan adalah Meningkatnya kualitas pemeliharaan Taman Makam Pahlawan. Pencapaian kinerja Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan adalah Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik, dengan anggaran terealisasi 0% dan capaian kinerja 50%.

Kegiatan :

- a) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota

Pencapaian indikator Kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Taman Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota, anggaran terealisasi 0% dan capaian kinerja 50%.

Sub. Kegiatan :

- 1) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota

Indikator kinerja sub kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota adalah Jumlah Taman Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota, anggaran terealisasi 0% dengan capaian kinerja 50%.

Pada Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan tersebut bertujuan untuk memelihara Taman Makam Pahlawan. Pada program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan. Dengan total anggaran Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan sebesar Rp. 9.500.000,- terserap Rp. 0,- atau 0% dengan capaian kinerja 50%.

Total anggaran yang dikelola oleh Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto sebesar Rp. 25.578.659.507,00 terealisasi sebesar Rp. 3.001.452.094,- atau 17,57% dengan capaian kinerja 50%.

Pencapaian Kinerja dan Anggaran untuk Triwulan II sebagaimana tersebut Tabel 2.1.

Tabel 2.1.
LAPORAN EVALUASI TARGET KINERJA DAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2025
TRIWULAN II

OPD / UNIT KERJA : DINAS SOSIAL KABUPATEN MOJOKERTO

NO	SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN / PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN	KINERJA			SASARAN PPKS - PSKS			WAKTU PELAKSANAAN	ANGGARAN (Rp)			KENDALA / PERMASALAHAN
			TARGET / SATUAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN		ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,05	40,53	50,00	81,05	76,00	93,77	Apr - Juni				

		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	96,10	48,05	50,00	96,10	17,57	18,28					
		Indeks Profesionalitas ASN	81,00	40,50	50,00	81,00	0	-					
	Optimalisasi kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah Inovasi Yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi serta Berkelanjutan	3	3	100,00	3	3	100,00					
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Kinerja Program	90	45	50,00	90	45	50,00	Apr - Juni	5.600.803.140	2.147.645.094	38,35	

	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	90	45	50,00	90	45	50,00		11.950.000	4.800.000	40,17	
	1. Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	4,5	50,00	9 Dokumen	2	22,22		5.950.000	2.900.000	48,74	
	2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	5	50,00	10 Laporan	4	40,00		6.000.000	1.900.000	31,67	
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	96,10	48,05	50,00	96,10	17,57	18,28		4.765.826.000	1.951.632.421	40,95	

		Perangkat Daerah											
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	6	50,00	12	6	50,00		4.765.826.000	1.951.632.421	40,95	
			Orang/ Bulan			Orang/ Bulan							
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	89	44,5	50,00	89	44,5	50,00		233.426.200	15.818.000	6,78	
1.	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	12	6	50,00	12	6	50,00		96.493.200	0	0,00	
			Paket			Paket							

	Perlengkap an Kantor	Kantor yang Disediakan											
2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	6	50,0 0	12 Paket	6	50,0 0		50.000.0 00	0	0,00	
3.	Penyediaan Bahan/Mate rial	Jumlah Paket Bahan/Mater ial yang Disediakan	12 Paket	6	50,0 0	12 Paket	6	50,0 0		41.076.1 00	0	0,00	
4.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	6	50,0 0	12 Paket	6	50,0 0		19.906.9 00	3.193.00 0	16,0 4	
5.	Penyelengga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan	12 Lapora n	6	50,0 0	12 Lapora n	6	50,0 0		25.950.0 00	12.625.0 00	48,6 5	

		Konsultasi SKPD											
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	89	44,5	50,00	89	44,5	50,00		347.595.840	132.864.673	38,22	
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6	50,00	12 Laporan	6	50,00		225.000.000	83.014.753	36,90	
2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 Laporan	6	50,00	12 Laporan	6	50,00		122.595.840	49.849.920	40,66	

		Kantor yang Disediakan											
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	90	45	50,00	90	45	50,00		242.005.100	42.530.000	17,57	
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	6,5	50,00	13 Unit	1	7,69		162.329.300	35.555.000	21,90	
2.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	8 Unit	4	50,00	8 Unit	1	12,50		79.675.800	6.975.000	8,75	

	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi											
	Meningkatnya PPKS yang mandiri	Persentase PPKS yang meningkat statusnya atau mampu mandiri	97,98	48,99	50,00				Apr - Juni				
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial aktif	65	32,5	50,00	72	0	0,00	Apr - Juni	262.275.000	45.000.000	17,16	
						Orang	Orang						
1.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang	72 Orang	36	50,00	72	0	0,00		117.275.000	45.000.000	38,37	

		mendapatka n sertifikat											
1.	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	54 Orang	27	50,00	54	0	0,00		4.075.000	0	0,00	
2.	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang	18 Orang	9	50,00	18	0	0,00		113.200.000	45.000.000	39,75	

	n Kabupaten/ Kota	Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/K ota											
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatka n layanan pemberdayaa n sosial	65	32,5	50,0 0	90 Lemba ga	0 Lemb aga	0,00	Apr - Juni	145.000. 000	-	0,00	
	1. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PPKS yang mendapatka n fasilitasi pengembang an usaha	65	32,5	50,0 0	90	0	0,00		145.000. 000	-	0,00	
	3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahtera an Sosial	Jumlah Lembaga Kesejahteraa n Sosial yang Meningkat Kapasitasnya	90 Lemba ga	45	50,0 0	90	0	0,00		145.000. 000	0	0,00	

	Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kewenangan Kabupaten/Kota											
3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Desa yang updating SIKS-NG	55	27,5	50,00	523.155	523.155	100,00	Apr - Juni	9.587.484.400	115.496.000	1,20	
	1 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data kesejahteraan sosial yang terverifikasi dan tervalidasi sesuai standar	523.155	261.578	50,00	523.155	523.155	100,00		9.540.704.400	110.910.000	1,16	

[illegible]

	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penerima bansos yang memiliki embrio usaha	55	27,5	50,0 0	20 Orang	- Orang	0,00	Apr - Juni	46.780.0 00	4.586.00 0	9,80	
1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PPKS yang berwirausaha mandiri	20 Kelu- ga	10	50,0 0	20	-	0,00		46.780.0 00	4.586.00 0	9,80	
3.	Fasilitasi Bantuan Pengemban- gan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang yang Mendapatka n Bantuan Pengembang an Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	20 Orang	10	50,0 0	20	0	0,00		46.780.0 00	4.586.00 0	9,80	
4	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase kejadian bencana yang ditangani sesuai	50	25	50,0 0	1.046 Orang	423 Orang	40,4 4	Apr - Juni	93.459.5 00	10.180.0 00	10,8 9	

		standar tanggap darurat											
1.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase PPKS korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada masa bencana sesuai standar	1.000 Orang	500	50,0 0	1.000	423	42,3 0		81.100.0 00	6.680.00 0	8,24	
1.	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan	500 Orang	250	50,0 0	500	140	28,0 0		73.800.0 00	4.700.00 0	6,37	

		Kabupaten/Kota											
	2. Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia Pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota	250 Orang	125	50,00	250	140	56,00		4.800.000	580.000	12,08	
	3. Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial	250 Orang	125	50,00	250	143	57,20		2.500.000	1.400.000	56,00	

		Kewenangan Kabupaten/ Kota											
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial aktif	50	25	50,0 0	46 Orang	0 Orang	0,00	Apr - Juni	12.359.5 00	3.500.00 0	28,3 2	
	2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan sertifikat	46 Orang	23	50,0 0	46	0	0,00		12.359.5 00	3.500.00 0	28,3 2	
	1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan	46 Orang	23	50,0 0	46	0	0,00		12.359.5 00	3.500.00 0	28,3 2	

		Kabupaten/ Kota											
5	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial yang sesuai standar	45	43	95,5 6	1.228	1162	94,6 3	Apr - Juni	1.525.13 7.467	680.131. 000	44,5 9	
						Orang							
	1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS yang mendapatka n rehabilitasi sosial	1.040	553	53,1 3	1.025	973	94,9 3		1.358.13 7.467	548.769. 100	40,4 1	
			Orang										
	1. Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan	820	410	50,0 0	820	820	100, 00		616.000. 000	270.191. 300	43,8 6	

		Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota	Orang										
	2. Penyedian Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten / Kota	50 Orang	25	50,00	50	50	100,00		146.038.300	1.740.000	1,19	
	3. Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	30	100,00	30	30	100,00		120.988.867	87.277.800	72,14	

	4.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	7,5	50,00	15	5	33,33		5.000.000	1.300.000	26,00	
	5.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota	50 Orang	50	100,00	50	50	100,00		432.748.000	173.860.000	40,18	
	6.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Anak Terlantar,	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,	10 Orang	5	50,00	10	0	0,00		2.988.000	0	0,00	

	Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota											
7.	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten / Kota	15 Orang	7,5	50,00	15	0	0,00		3.000.000	1.500.000	50,00	
8.	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	7,5	50,00	15	4	26,67		5.000.000	1.900.000	38,00	

	9. Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kot a	20 Orang	10	50,0 0	20	13	65,0 0		26.374.3 00	11.000.0 00	41,7 1	
	2. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS yang mendapatka n rehabilitasi sosial	188 Orang	196	103, 99	203	189	93,1 0		167.000. 000	131.361. 900	78,6 6	
	1. Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal	188 Orang	188	100, 00	188	188	100, 00		164.000. 000	130.361. 900	79,4 9	

		Kewenangan Kabupaten/Kot a											
	2. Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk an, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan , Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten / Kota	15 Orang	7,5	50,0 0	15	1	6,67		3.000.00 0	1.000.00 0	33,3 3	
6 .	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang	100	100	100, 00	6	0	0,00	Apr - Juni	9.500.00 0	3.000.00 0	31,5 8	
						Maka m							

		terkelola dengan baik											
	1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah Taman Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/ Kota	6 Makam	6	100,00	6	0	0,00		9.500.000	3.000.000	31,58	
	1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah Taman Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman	6 Makam	6	100,00	6	0	0,00		9.500.000	3.000.000	31,58	

		Makam Pahlawan Kabupaten/ Kota											
TOTAL										17.078.6 59.507	3.001.45 2.094	17,5 7	

Sumber Data Dinas Sosial

Mojokerto, Juli 2025

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN MOJOKERTO

TRY RAHARJO MURDIANTO, S. STP., M

Pembina Tk. I
NIP. 19870519 200602 1 002

Kegiatan review evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun lalu dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan yang telah disusun dan telah direncanakan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah. Capaian Renstra Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto sampai dengan Tahun lalu pada umumnya dapat tercapai. Hal ini dapat dilihat dan disajikan pada hasil pencapaian kinerja atas Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan yang dilaksanakan. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan sampai dengan Tahun lalu, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana dijabarkan dalam tabel 2.2. (T-C.29) sebagai berikut :

Tabel TC.29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL DAN
PENCAPAIAN RENSTRA DINAS SOSIAL S/D TAHUN 2025
KABUPATEN MOJOKERTO

Nama PD : DINAS SOSIAL

Kode				Urusan/Bidang Urusan	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Target	Target dan Realisasi Kinerja Program /Kegiatan/Sub. Kegiatan			Target Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Perkiraan Realisasi Capaian			
								Tahun Lalu (n.2)				Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2025)			
								Program dan Keluaran Kegiatan/Sub. Kegiatan s/d tahun (n.3)	Target Renja OPD Tahun (n.2)	Realisasi Renja OPD		Tingkat Realisasi	(Renja OPD Tahun n.1) Tahun 2025	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n.1) Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11 = (10 / 4)		
				Urusan Sosial Bidang Urusan Sosial											
				Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,05	80,48	80,50	80,98	100,60%	81,05	81,05	100%		

					Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	96,10	90	90	95,53	106,14%	96,10	96,10	100%
					Indeks Profesionalitas ASN	81	65	64,24	78,01	98.83%	81	81	100%
				Optimalisasi kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah Inovasi Yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi	3	1	1	2	200%	3	3	100%
06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program	90%	90%	90%	90%	100%	90%	90%	100%
06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	90%	90%	90%	90%	100%	90%	90%	100%
06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	5 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	9 Dokumen	9 Dokumen	100%
06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	5 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100%	10 Laporan	10 Laporan	100%

06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	81	60	60	78,01	130,02%	81	81	100%
06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	96,10%	80%	90%	95,53%	106,14%	96,10%	96,10%	100%
06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/Bulan	14 Bulan	40 Orang/Bulan	40 Orang/Bulan	100%	40 Orang/Bulan	40 Orang/Bulan	100%
06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	89%	85%	87%	87%	100%	89%	89%	100%
06	01	2.06	0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Bulan	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	12 Paket	100%
06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Bulan	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	12 Paket	100%
06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Bulan	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	12 Paket	100%

06	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan / Material yang Disediakan	12 Paket	0	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	12 Paket	100%
06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	89%	85%	87%	87%	100%	89%	89%	100%
06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	90%	85%	85%	85%	100%	90%	90%	100%

06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit = 17 Unit (4 unit Mobil Pinjam pakai dr Kemensos)	12 Bulan	13 Unit	13 Unit	100%	13 Unit	13 Unit	100%
06	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	8 Unit	12 Bulan	8 Unit	8 Unit	100%	8 Unit	8 Unit	100%
				Meningkatnya PPKS yang mandiri	Persentase PPKS yang meningkat statusnya atau mampu mandiri	97,98%							
06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial aktif	65%	80%	75%	75%	100%	65%	65%	100%

06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan sertifikat	65%	60 PSM, 18 TKSK, 15 KUBE, 8 LKSA dan 180 Orang pengurus LKSA, 322 Orang pengurus Katar, 50 Oang klien PW	50 Orang, 18 Orang, 68 Lembaga	50 Orang, 18 Orang, 68 Lembaga	100%	65%	65%	100%
06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	54 Orang	60 Orang	50 Orang	50 Orang	100%	54 Orang	54 Orang	100%
06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten / Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya	18 Orang	18 Orang	18 Orang	18 Orang	100%	18 Orang	18 Orang	100%
06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan layanan pemberdayaan sosial	65%	80%	75%	75%	100%	65%	65%	100%

06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PPKS yang mendapatkan fasilitasi pengembangan usaha	65%	60 PSM, 18 TKSK, 15 KUBE, 8 LKSA dan 180 Orang pengurus LKSA, 322 Orang pengurus Katar, 50 Oang klien PW	50 Orang, 18 Orang, 68 Lembaga	50 Orang, 18 Orang, 68 Lembaga	100%	65%	65%	100%
06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten / Kota	90 Lembaga	8 LKSA dan 180 Orang pengurus LKSA, 322 Orang pengurus Katar, 50 Oang klien PW	41 Lembaga (LKS), 19 Pengurus Katar (Kec+Kab), 8 UEP Katar (Desa)	41 Lembaga (LKS), 19 Pengurus Katar (Kec+Kab), 8 UEP Katar (Desa)	100%	90 Lembaga	90 Lembaga	100%
06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial yang sesuai standar	45%	60%	55%	55%	100%	45%	45%	100%
06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	45%	18 Disabilitas, 9 Gepeng, 12 Bulan	181 Orang, 25 Orang, 50 Orang	181 Orang, 25 Orang, 50 Orang	100%	45%	45%	100%

06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota	820 Orang	0	181 Orang	181 Orang	100%	820 Orang	820 Orang	100%
06	04	2.01	0002	Penyedian Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten / Kota	50 Orang	0	0	0	0%	50 Orang	50 Orang	100%
06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten / Kota	30 Orang	18 Orang	25 Orang	25 Orang	100%	30 Orang	30 Orang	100%
06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	0	0	0	0%	15 Orang	15 Orang	100%

06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota	50 Orang	0	0	0	0%	50 Orang	50 Orang	100%
06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	10 Orang	9 Orang Gepeng	0	0	0%	10 Orang	10 Orang	100%
06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten / Kota	15 Orang	0	0	0	0%	15 Orang	15 Orang	100%
06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	0	0	0	0%	15 Orang	15 Orang	0%

06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	0	50 Orang	50 Orang	100%	20 Orang	20 Orang	100%
06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	45%	186 KK, 20 Orang PSK, 150 Peserta adopsi, 1 kali razia, 150 Peserta ABH	50 Orang, 50 Orang, 50 Orang, 50 Orang	50 Orang, 50 Orang, 50 Orang, 50 Orang	100%	45%	45%	100%
06	04	2.02	0003	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota	188 Orang	186 KK	50 Orang	50 Orang	100%	188 Orang	188 Orang	100%

06	04	2.01	0007	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten / Kota	15 Orang	0	0	0	0%	15 Orang	15 Orang	100%
06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Desa yang updating SIKS-NG	55%	60%	60%	60%	100%	55%	55%	100%
06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data kesejahteraan sosial yang terverifikasi dan tervalidasi sesuai standar	55%	19 Orang, 114 Orang, 304 Desa, 18 Kecamatan, '78.930 Keluarga	324.480 Keluarga, 78.930 Keluarga, 38.044 KPM	324.480 Keluarga, 78.930 Keluarga, 38.044 KPM	100%	55%	55%	100%

06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten / Kota	215.000 Keluarga	304 Desa 18 Kecamatan	324.480 Keluarga	324.480 Keluarga	100%	215.000 Keluarga	215.000 Keluarga	100%
06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	7.430 Keluarga	78.930 Keluarga	78.930 Keluarga	78.930 Keluarga	100%	7.430 Keluarga	7.430 Keluarga	100%
06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penerima bansos yang memiliki embrio usaha	55%	60%	60%	60%	100%	55%	55%	100%
06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PPKS yang berwirausaha mandiri	55%	19 Orang, 114 Orang, 304 Desa, 18 Kecamatan, '78.930 Keluarga	324.480 Keluarga, 78.930 Keluarga, 38.044 KPM	324.480 Keluarga, 78.930 Keluarga, 38.044 KPM	100%	55%	55%	100%

06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	20 Orang	0	38.044 KPM	38.044 KPM	100%	20 Orang	20 Orang	100%
06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase kejadian bencana yang ditangani sesuai standar tanggap darurat	50%	60%	60%	60%	100%	50%	50%	100%
06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase PPKS korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada masa bencana sesuai standar	50%	12 Bulan, 12 Bulan	371 Orang	371 Orang	100%	50%	50%	100%
06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari Dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten / Kota	500 Orang	12 Bulan	371 Orang	371 Orang	100%	500 Orang	500 Orang	100%

06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia Pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota	250 Orang	0	0	0	0%	250 Orang	250 Orang	100%
06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/ Kota	250 Orang	0	0	0	0%	250 Orang	250 Orang	100%
06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial aktif	50%	60%	60%	60%	100%	50%	50%	100%
06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan sertifikat	46 Orang	44 Orang	40 Orang	40 Orang	100%	46 Orang	46 Orang	100%

06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	46 Orang	44 Orang	40 Orang	40 Orang	100%	46 Orang	46 Orang	100%
06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	100%	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06	07	2.01		Pemeiliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	6 Makam	0	6 Makam	6 Makam	100%	6 Makam	6 Makam	100%
06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah Taman Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/ Kota	6 Makam	0	6 Makam	6 Makam	100%	6 Makam	6 Makam	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara garis besar Dinas Sosial memiliki 3 (tiga) sasaran, yang terdiri dari 1 (satu) sasaran strategis dan 2 (dua) sasaran kinerja lainnya. Seluruhnya telah ditetapkan dalam rencana strategis untuk Tahun 2025 dan dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun Ikhtisar pencapaian sasaran dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.2.
Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Dinas Sosial

No.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN
1.	Meningkatnya kesejahteraan sosial	Indeks Kesejahteraan Sosial
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS
	Meningkatnya PPKS yang mandiri	Persentase PPKS yang mandiri
	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
	1. Pemberdayaan Sosial	1. Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
		2. Persentase PPKS yang mendapatkan layanan pemberdayaan sosial
	2. Perlindungan dan Jaminan Sosial	1. Persentase Desa yang updating SIKS-NG
		2. Persentase Penerima bansos yang memiliki embrio usaha
	3. Penanganan Bencana	1. Persentase kejadian bencana yang ditangani sesuai standar tanggap darurat
		2. Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial aktif
	4. Rehabilitasi Sosial	1. Persentase PPKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial yang sesuai standar

	5. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	1. Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik
	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA KINERJA LAINNYA
	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah
		Indeks Profesionalitas ASN
	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan
	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
	6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase Capaian Kinerja Program

No	Sasaran	Pencapaian	
		Tercapai	Tidak Tercapai
1.	Meningkatnya PPKS yang mandiri	√	
2.	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	√	
3.	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	√	

Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur keberhasilan/kegagalan dan pencapaian sasaran adalah :

Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial aktif	100%	100%	100%
Persentase PPKS yang mendapatkan layanan pemberdayaan sosial	100%	100%	100%
Persentase Desa yang updating SIKS-NG	90%	90%	100%
Persentase Penerima bansos yang memiliki embrio usaha	12,05%	12,05%	100%
Persentase kejadian bencana yang ditangani sesuai standar tanggap darurat	100%	100%	100%
Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial aktif	100%	100%	100%
Persentase PPKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial yang sesuai standar	0,21%	0,21%	100%
Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	100%	100%	100%
Persentase Capaian Kinerja Program	90%	90%	100%
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Baik	Baik	100%
Hasil Capaian Kinerja			100%

Hasil capaian kinerja sasaran **Meningkatnya PPKS yang mandiri** melalui Program Pemberdayaan Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Penanganan Bencana, Program Rehabilitasi Sosial. Sedangkan capaian kinerja sasaran **Meningkatnya kualitas pemeliharaan Makam Pahlawan Nasional** diampu oleh Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan pada hasil survey kepuasan masyarakat (SKM) menunjukkan capaian kinerja sebesar 100%. Dari indikator *output* diatas, hasil (*outcome*) yang diharapkan adalah terwujudnya penurunan PPKS penerima manfaat kesejahteraan sosial.

Sedangkan hasil capaian kinerja lainnya **Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel** dan **Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah** melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Capaian Kinerja di tinjau dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Meliputi :

No	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Capaian Kinerja
1	Persentase PPKS yang mandiri	$\frac{\text{Jumlah PPKS yang mandiri}}{\text{Jumlah PPKS}} \times 100\%$

Adapun Capaian Kinerja Program di tinjau dari Indikator Kinerja Program yang ada di Dinas Sosial Meliputi:

No	Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Capaian Kinerja
1	Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial aktif	$\frac{\text{Jumlah PSKS yang aktif}}{\text{Jumlah PSKS yang ada}} \times 100\%$
		Persentase PPKS yang mendapatkan layanan pemberdayaan sosial	$\frac{\text{Jumlah PPKS yang mendapatkan layanan pemberdayaan sosial}}{\text{Jumlah PPKS yang terdata}} \times 100\%$

2	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Desa yang updating SIKS-NG	Desa dan kelurahan yang melakukan updating data $\frac{\text{Jumlah desa dan kelurahan yang melakukan updating data}}{\text{Jumlah desa dan kelurahan}} \times 100\%$
		Persentase Penerima bansos yang memiliki embrio usaha	Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi $\frac{\text{Jumlah KPM PKH yang mempunyai embrio usaha}}{\text{Jumlah KPM PKH}} \times 100\%$
3	Penanganan Bencana	Persentase kejadian bencana yang ditangani sesuai standar tanggap darurat	Jumlah kejadian bencana yang ditanganiJumlah kejadian bencana yang ditangani $\frac{\text{Jumlah kejadian bencana yang ditangani}}{\text{Jumlah kejadian bencana}} \times 100\%$
		Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial aktif	Jumlah PSKS aktif $\frac{\text{Jumlah PSKS aktif}}{\text{Jumlah PSKS yag ada}} \times 100\%$
4	Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial yang sesuai standar	Jumlah PPKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial yang sesuai standar $\frac{\text{Jumlah PPKS}}{\text{Jumlah PPKS}} \times 100\%$
5	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	Jumlah makam yang terkelola $\frac{\text{Jumlah makam yang terkelola}}{\text{Jumlah makam yang seharusnya dikelola}} \times 100\%$

Dari 3 sasaran yang ada dan 6 indikator kinerja program, 12 indikator kinerja kegiatan dan 34 indikator kinerja sub kegiatan yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2025 sudah mencapai target.

Adapun faktor yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan dari sasaran strategis Dinas Sosial beserta tindak lanjutnya adalah sebagai berikut :

Faktor Keberhasilan :

- 1. Pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan KAK;
- 2. Pelaksanaan anggaran sudah sesuai anggaran kas.

Faktor Kegagalan :

1. Adanya kenaikan harga pokok;
2. Adanya penambahan anggaran untuk Sub. Kegiatan yang mana di APBD Tahun 2025 tidak teranggarkan;
3. Adanya kebijakan dari pemerintah pusat tentang penambahan (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) DBHCHT, sesuai dengan Data Proyeksi DBHCHT.

Tindak lanjut :

1. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 (P-APBD);
2. Usulan penambahan anggaran melalui P-APBD Tahun 2025.

Dinas Sosial mempunyai 2 sasaran kinerja lainnya yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2025 sudah mencapai target.

Adapun faktor yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan dari sasaran kinerja lainnya beserta tindak lanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel.

Faktor Keberhasilan :

- 1.1 Nilai Sakip Perangkat Daerah yang mana target 81,50 terealisasi 82,56 (A), ini dikarenakan oleh bukti dukung yang relevan;
- 1.2 Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah dengan target 96,10% terealisasi 81,64%, hal ini dikarenakan kinerja Dinas Sosial baik yang menyebabkan penyerapan anggaran tinggi;
- 1.3 Indeks Profesionalitas ASN dengan target 81 terealisasi 81,60 (Kategori Baik), hal ini dikarenakan kinerja ASN Dinas Sosial tinggi salah satunya dengan banyak memiliki diklat kompetensi.

Faktor Kegagalan :

- 1.1 Masih ada beberapa dokumen yang belum *tercover* dan terdokumentasikan;
- 1.2 Perlu adanya penambahan anggaran untuk Sub. Kegiatan yang mana di APBD Tahun 2025 tidak teranggarkan;
- 1.3 Kurangnya sosialisasi dari BKPSDM untuk pelatihan/diklat/webinar/dll bagi ASN.

Tindak lanjut :

- 1.1 Mendokumentasikan evaluasi dan monitoring kegiatan;
 - 1.2 Usulan penambahan anggaran melalui P-APBD Tahun 2025;
 - 1.3 Sosialisasi dari BKPSDM untuk pelatihan/diklat/webinar/dll bagi ASN.
2. Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah.

Faktor Keberhasilan :

- 2.1 Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan sebanyak 3 dan terealisasi 3, yaitu Sang Patih Kesos, Gerbang Kesos dan Bulik Soima.

Faktor Kegagalan :

- 2.1 Perlu adanya SK Kepala Dinas untuk melegalkan bahwa Inovasi tersebut diakui.

Tindak lanjut :

- 2.1 SK Kepala Dinas untuk melegalkan bahwa Inovasi tersebut diakui.

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah kabupaten diperlukan suatu tolak ukur kinerja. Tolak ukur kinerja ini didapat dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan. Analisis kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto

mewujudkan perencanaan pembangunan daerah kabupaten diperlukan suatu tolak ukur kinerja. Tolak ukur kinerja ini didapat dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan. Analisis kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto berdasarkan indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel 2.3. (T-C.30) sebagaimana berikut dibawah ini :

TABEL 2.3 (T-C 30)
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN MOJOKERTO

NO	INDIKATOR	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA OPD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN AKHIR
				Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	2025 (n=)	2026 (n+1)	Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	2025 (n=)	2026 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial aktif	100%		75%	75%	100%	100%	75%	75%	100%	100%	
	Persentase PPKS yang mendapatkan layanan pemberdayaan sosial	100%		75%	75%	100%	100%	75%	75%	100%	100%	
2.	Persentase Desa yang updating SIKS-NG	100%		60%	55%	90%	90%	60%	55%	90%	90%	
		100%		60%	55%	12,05%	12,05%	60%	55%	12,05%	12,05%	

	Persentase Penerima bansos yang memiliki embrio usaha											
3.	Persentase PPKS penerima manfaat Program Rehabilitasi Sosial	100%		55%	50%	0,21%	0,21%	55%	50%	0,21%	0,21%	
4.	Persentase kejadian bencana yang ditangani sesuai standar tanggap darurat	100%		60%	50%	100%	100%	60%	50%	100%	100%	
	Persentase kejadian bencana yang ditangani sesuai standar tanggap darurat	100%		60%	50%	100%	100%	60%	50%	100%	100%	
5.	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6.	Persentase Capaian Kinerja Program	100%		90%	9%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	

2.3. Isu-isu penting

Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto merumuskan isu strategis yang penting dalam perencanaan pembangunan lima tahun kedepan adalah sebagai berikut :

Isu Strategis Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto
Dari Masing-masing Sub Urusan

NO	ISU-ISU STRATEGIS	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN YANG MENJADI SOLUSI	INOVASI
1	2	3	4
1	Kemiskinan Ekstrem.	Program : Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Kegiatan : 1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota. 2. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga. 3. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat. Program : Program Rehabilitasi Sosial Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub. Kegiatan : 1. Penyediaan Permakanan. 2. Penyediaan Sandang. 3. Penyediaan Alat Bantu.	a) SANG PATIH KESOS (Sarana Pengaduan dengan Pelayanan Hati dan Kasih Sayang dalam Penanganan Kesejahteraan Sosial). b) BULIK SOIMA (Bupati Tilik Desa Mirsani Masyarakat). c) GERBANG KESOS (Gerakan Edukasi serta Pemberian Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial).

		Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Sub. Kegiatan : 1. Penyediaan Permakanan. Program : Penangan Bencana Kegiatan : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Sub. Kegiatan : 1. Penyediaan Makanan. 2. Penyediaan Sandang.	
2.	Perlindungan Sosial	Program : Penangan Bencana Kegiatan : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Sub. Kegiatan : 1. Pelayanan Dukungan Psikososial. Kegiatan : Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Sub. Kegiatan : 1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana. Program : Pemberdayaan Sosial Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	

		Sub. Kegiatan : 1. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota. Program : Penangan Rehabilitasi Sosial Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub. Kegiatan : 1. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga. 2. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial. 3. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat. 4. Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak. 5. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar. 6. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan. 7. Pemberian Layanan Kedaruratan.	
--	--	--	--

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah

Berdasarkan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 program, kegiatan dan sub. kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program, kegiatan dan sub. kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja utama Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dalam membangun kemandirian ekonomi dan sosial budaya yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta sinergitas program dengan Pemerintah Pusat. Proses penyusunan Perangkat Daerah dilaksanakan melalui mekanisme/ tahapan yang diawali dari Musrenbang Tingkat Kelurahan/Desa, Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan yang memenuhi tiga prinsip yakni partisipatif, kesinambungan dan keseluruhan (Holistik).

Restrukturisasi Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat dilaksanakan dalam perumusan program/kegiatan/Sub. Kegiatan sebagaimana urusan dan kewenangan Perangkat Daerah dalam undang-undang dimaksud dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Tahun 2026-2030 dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2030.

Selengkapnya sebagaimana tabel 2.3 (T-C.31) berikut :

TABEL T-C 31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN RENCANA KERJA P-APBD DINAS SOSIAL KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN ANGGARAN 2025

DINAS SOSIAL
KABUPATEN MOJOKERTO

NO	RANCANGAN AWAL RKPД									HASIL ANALISI KEBUTUHAN							CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PAGU INDIKATIF SETELAH REFOCUSING (Rp)	PAGU INDIKATIF SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH /BERKURANG (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	KEBUTUHAN DANA SETELAH REFOCUSING (Rp)	KEBUTUHAN DANA SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Dinas Sosial	Nilai Sakip Perangkat Daerah	81,50					Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Dinas Sosial	Nilai Sakip Perangkat Daerah	81,50					
			Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	96,10%							Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	96,10%					
			Indeks Profesionalitas ASN	81							Indeks Profesionalitas ASN	81					

	Optimalisasi kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Dinas Sosial	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	3					Optimalisasi kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Dinas Sosial	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	3					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Sosial	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai	90%	11.660.682.915	11.660.682.915	11.660.682.915	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Sosial	Persentase Capaian Kinerja Program	90%	5.600.803.140	5.600.803.140	5.600.803.140	0	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	90%	100.000.000	5.600.803.140	5.600.803.140	0	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	90%	11.950.000	11.950.000	11.950.000	0	
	1. Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	1. Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	5.950.000	5.950.000	5.950.000	0	

	2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	96,10%	8.000.087.075	8.000.087.075	8.000.087.075	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	96,10%	4.765.826.000	4.765.826.000	4.765.826.000	0	
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/Bulan	8.000.087.075				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	40 Orang/Bulan	4.765.826.000	4.765.826.000	4.765.826.000	0	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		IP ASN Perangkat Daerah	81	300.000.000	300.000.000	300.000.000	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		IP ASN Perangkat Daerah	81	0	0	0	0	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	89%	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	89%	233.426.200	234.065.700	234.065.700	639.500	

	1. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	470.000.000	470.000.000	470.000.000	0	1. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	96.493.200	78.998.200	78.998.200	(17.495.000)	
	2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	19.906.900	19.900.400	19.900.400	(6.500)	
	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	
	4. Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan / Material yang Disediakan	12 Paket	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	4. Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan / Material yang Disediakan	12 Paket	41.076.100	41.076.100	41.076.100	0	
	5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	300.000.000	300.000.000	300.000.000	0	5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	25.950.000	44.091.000	44.091.000	18.141.000	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	89%	347.595.840	347.595.840	347.595.840	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	89%	347.595.840	347.595.840	347.595.840	0	
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	225.000.000	225.000.000	225.000.000	0	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	225.000.000	225.000.000	225.000.000	0	
	2. Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	122.595.840	122.595.840	122.595.840	0	2. Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	122.595.840	122.595.840	122.595.840	0	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	90%	1.813.000.000	1.813.000.000	1.813.000.000	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	90%	242.005.100	241.365.600	241.365.600	(639.500)	

	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit = 17 Unit (4 unit Mobil Pinjam pakai dr Kemensos)	600.000.000	600.000.000	600.000.000	0	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit = 17 Unit (4 unit Mobil Pinjam pakai dr Kemensos)	162.329.300	161.689.800	161.689.800	(639.500)	
	2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	8 Unit	200.000.000	200.000.000	200.000.000	0	2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	8 Unit	79.675.800	79.675.800	79.675.800	0	

	Meningkatnya kesejahteraan sosial	Dinas Sosial	Indeks Kesejahteraan Sosial	97,98%					Meningkatnya PPKS yang mandiri	Dinas Sosial	Persentase PPKS yang mandiri	0,024%					
2	PROGRAM PEMBERDAYAN SOSIAL	Dinas Sosial	Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100%	3.779.120.730	3.779.120.730	3.779.120.730	0		Dinas Sosial	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial aktif	100%	262.275.000	262.275.000	262.275.000	0	Mendukung Program Unggulan Bupati Peduli PPKS dan Milenial Kreatif

	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah PSKS yang dibina dan difasilit asi	75 PSM, 18 TKSK 35 Lembaga	1.998.696. 615	1.998.696. 615	1.998.696. 615	0	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Potensi dan Sumber Kesejahter aan Sosial yang mendapatk an sertifikat	100%	262.275.0 00	117.275.0 00	117.275.000	(145.000)	
	1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Orang Menda pat Pening katan Kapasit as Pekerja Sosial Masyar akat Kewen angan Kabupa ten / Kota	75 Orang	53.000.00 0	53.000.00 0	53.000.00 0	0	1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Orang Mendapat Peningkata n Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenanga n Kabupaten / Kota	54 Orang	4.075.000	4.075.000	4.075.000	0	
	2. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Tenaga Keseja hteraan Sosial Kecam atan Kewen angan Kabupa ten / Kota yang Mening kat Kapasit asnya	18 Orang	200.000.0 00	200.000.0 00	200.000.0 00	0	2. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Tenaga Kesejahtera an Sosial Kecamatan Kewenanga n Kabupaten / Kota yang Meningkat Kapasitasn ya	18 Orang	113.200.0 00	113.200.0 00	113.200.000	0	

	3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten / Kota	35 Lembaga	1.745.696.615	1.745.696.615	1.745.696.615	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	PROGRAM PEMBERDAYAN SOSIAL	Dinas Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan layanan pemberdayaan sosial	100%	145.000.000	145.000.000	145.000.000	0	Mendukung Program Unggulan Bupati Peduli PPKS dan Milenial Kreatif
	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Persentase PPKS yang mendapatkan fasilitasi pengembangan usaha	100%	145.000.000	145.000.000	145.000.000	0	
									3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten / Kota	90 Lembaga	145.000.000	145.000.000	145.000.000	0	

3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial	Persentase PPKS penerima manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	90%	12.624.124.268	12.624.124.268	12.624.124.268	0	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial	Persentase Desa yang updating SIKS-NG	90%	9.587.484.400	18.087.484.400	18.087.484.400	8.500.000.000	Mendukung Program Unggulan Bupati Perempuan Berkarya, Gercep Stunting dan Peduli PPKS (Masyarakat Miskin, Disabilitas Dan Lansia)
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah data fakir miskin yang dikelola	324.480 Keluarga, 78.930 Keluarga, 34.163 Orang	12.474.124.268	12.474.124.268	12.474.124.268	0	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Data kesejahteraan sosial yang terverifikasi dan tervalidasi sesuai standar	5%	9.587.484.400	18.040.704.400	18.040.704.400	8.453.220.000	
	1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten / Kota	324.480 Keluarga	375.000.000	375.000.000	375.000.000	0	1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten / Kota	215.000 Keluarga	88.087.000	88.087.000	88.087.000	0	

	-	-	-	-	-	-	-	-	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosal	Persentase Penerima bansos yang memiliki embrio usaha	12,05%	46.780.00 0	46.780.00 0	46.780.000	0	Menduku ng Program Unggula n Bupati Perempu an Berkarya, Gercep Stunting dan Peduli PPKS (Masyara kat Miskin, Disablita s Dan Lansia)
	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase PPKS yang berwirausa ha mandiri	0,24%	46.780.00 0	46.780.00 0	46.780.000	0	
	-	-	-	-	-	-	-	-	3. Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Jumlah Orang yang Mendapatk an Bantuan Pengemban gan Ekonomi Masyarakat Kewenanga n Kabupaten / Kota	20 Orang	46.780.00 0	46.780.00 0	46.780.000	0	
4	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Din as Sosi al	Persen tase korban bencan a alam dan sosial yang menda pat perlind ungan sosial	100%	900.000.0 00	900.000.0 00	900.000.0 00	0	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Dinas Sosial	Persentase kejadian bencana yang ditangani sesuai standar tanggap darurat	100%	93.459.50 0	93.459.50 0	93.459.500	0	Menduku ng SPM dan Program Bupati PEDULI PPKS

	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Jumlah perlind ungan sosial korban Benca na Alam dan Sosial Kabup aten/K ota	400 Orang, 10 Tempat	600.000.0 00	600.000.0 00	600.000.0 00	0	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Persentase PPKS korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada masa bencana sesuai standar	100%	81.100.00 0	81.100.00 0	81.100.000	0	
	1. Penyediaan Makanan		Jumlah Orang yang Menda patkan Permak anan 3x1 Hari Dalam Masa Tangga p Darurat (Pengu ngsian) Kewen angan Kabupa ten / Kota	400 Orang	150.000.0 00	150.000.0 00	150.000.0 00	0	1. Penyediaan Makanan		Jumlah Orang yang Mendapatk an Permakana n 3x1 Hari Dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsi an) Kewenanga n Kabupaten / Kota	500 Oang	73.800.00 0	73.800.00 0	73.800.000	0	

	2. Penyediaan Sandang		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia Pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota	400 Orang	150.000.000	150.000.000	150.000.000	0	2. Penyediaan Sandang		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia Pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota	250 Orang	4.800.000	4.800.000	4.800.000	0	
	3. Pelayanan Dukungan Psikososial		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/ Kota	400 Orang	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	4. Pelayanan Dukungan Psikososial		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/ Kota	250 Orang	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	

	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Din as Sosi al	Persen tase korban bencan a alam dan sosial yang menda pat perlind ungan sosial	100%	900.000.0 00	900.000.0 00	900.000.0 00	0	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Dinas Sosial	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahter aan Sosial aktif	100%	12.359.50 0	12.359.50 0	12.359.500	0	Menduku ng SPM dan Program Bupati PEDULI PPKS
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Melaks anakan Koordi nasi, Sosiali sasi dan Pelaks anaan Taruna Siaga Benca na	50 Orang	300.000.0 00	300.000.0 00	300.000.0 00	0	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Persentase Potensi dan Sumber Kesejahter aan Sosial yang mendapatk an sertifikat	100%	12.359.50 0	12.359.50 0	12.359.500	0	
	1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		Jumlah Orang yang Melaks anakan Koordin asi, Sosialis asi dan Pelaks anaan Taruna Siaga Bencan a Kewen angan Kabupa ten/Kot a	50 Orang	150.000.0 00	150.000.0 00	150.000.0 00	0	1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		Jumlah Orang yang Melaksanak an Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaa n Taruna Siaga Bencana Kewenanga n Kabupaten/ Kota	46 Orang	12.359.50 0	12.359.50 0	12.359.500	0	

5	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial	Persentase PPKS penerima manfaat Program Rehabilitasi Sosial	45%	5.725.000.000	5.725.000.000	5.725.000.000	0	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial	Persentase PPKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial yang sesuai standar	0,21%	1.525.137.467	1.525.137.467	1.525.137.467	0	Mendukung Program Unggulan Bupati Peduli PPKS (Anak Terlantar dan Lansia Terlantar, Penyandang Disabilitas, dan Kelompok Minoritas)
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi	1.160 Orang	2.200.000.000	2.200.000.000	2.200.000.000	0	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Persentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	0,17%	1.358.137.467	1.358.137.467	1.358.137.467	0	

	1. Penyediaan Permakanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemuhan Kebutu han Permak anan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewen angan Kabupa ten / Kota	300 Orang	750.000.0 00	750.000.0 00	750.000.0 00	0	1. Penyediaan Permakanan		Jumlah Orang yang Mendapatk an Pemuhan Kebutu han Permakana n Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenanga n Kabupaten / Kota	820 Orang	616.000.0 00	616.000.0 00	616.000.000	0	
	2. Penyediaan Sandang		Jumlah Orang yang Meneri ma Pakaia n dan Keleng kapan Lainnya yang Tersedi a dalam 1 Tahun Kewen angan Kabupa ten / Kota	300 Orang	400.000.0 00	400.000.0 00	400.000.0 00	0	2. Penyediaan Sandang		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapa n Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenanga n Kabupaten / Kota	50 Orang	146.038.3 00	146.038.3 00	146.038.300	0	

	3. Penyediaan Alat Bantu		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kewenangan Kabupaten / Kota	35 Orang	200.000.000	200.000.000	200.000.000	0	3. Penyediaan Alat Bantu		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten / Kota	35 Orang	120.988.867	120.988.867	120.988.867	0	
	4. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	4. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	15 Orang	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	
	5. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota	50 Orang	400.000.000	400.000.000	400.000.000	0	5. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota	50 Orang	432.748.000	432.748.000	432.748.000	0	

	6.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kabupaten / Kota	50 Orang	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	6.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kabupaten / Kota	10 Orang	2.988.000	2.988.000	2.988.000	0	
	7.	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten / Kota	50 Orang	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	7.	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten / Kota	15 Orang	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	

	8. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	8. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	
	9. Pemberian Layanan Kedaruratan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten / Kota	75 Orang	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	9. Pemberian Layanan Kedaruratan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten / Kota	20 Orang	26.374.300	26.374.300	26.374.300	0	
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi	1.529 Orang	3.525.000.000	3.525.000.000	3.525.000.000	0	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Persentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	0,04%	167.000.000	167.000.000	167.000.000	0	

	1. Penyediaan Permakanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota	186 Orang	475.000.000	475.000.000	475.000.000	0	1. Penyediaan Permakanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota	188 Orang	164.000.000	164.000.000	164.000.000	0	
	-	-	-	-	-	-	-	-	2. Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak		Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten / Kota	15 Orang	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	

6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Dinas Sosial	Persentase Jumlah Taman Makam Pahlawan yang Dikelola	100%	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Dinas Sosial	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang dikelola dengan baik	100%	9.500.000	9.500.000	9.500.000	0	
	Pemeeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota		Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten / Kota	6 Makam	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	Pemeeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota		Jumlah Taman Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten / Kota	6 Makam	9.500.000	9.500.000	9.500.000	0	
	1. Pemeeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota		Jumlah Taman Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/ Kota	6 Makam	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	2. Pemeeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota		Jumlah Taman Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/ Kota	6 Makam	9.500.000	9.500.000	9.500.000	0	
					34.728.927.913	34.728.927.913	34.728.927.913	0					17.078.659.507	28.597.288.507	28.597.288.507	11.518.629.000	

Sumber Data Dinas Sosial

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyelenggaraan pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di wilayah Kabupaten Mojokerto terdapat tiga pemangku kepentingan yang saling mendukung, yaitu Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha. Sehingga setiap pemangku kepentingan dapat mengusulkan program dan kegiatan pengentasan kemiskinan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Mojokerto setiap tahunnya.

Selanjutnya dari hasil penelitian dan usulan tersebut diverifikasi terlebih dahulu bersama dengan Bappeda Kabupaten Mojokerto, Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto dan pihak pemangku kepentingan, antara lain :

1. Bahwa Usulan Program/Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun/Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke forum Musrenbangdes;
2. Di Forum Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan;
3. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu -isu penting dari masing-masing PD yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan.

Berikut ini usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan masyarakat dan dunia usaha yang masuk dalam Musrenbang Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2025 :

TABEL 2.5 (TC.32)
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN
TAHUN ANGGARAN 2025
KABUPATEN MOJOKERTO

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volumen	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.		NIHIL			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Visi dan Misi

Visi

1. Penetapan visi sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto, merupakan langkah penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Visi yang disusun memberikan gambaran ideal yang hendak diwujudkan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto.
2. Visi Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto adalah yang disusun di Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto digali bersama, diupayakan pencapaiannya secara bersama-sama karena visi tersebut merupakan milik bersama yang diyakini dapat dicapai bersama aparatur yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto. Visi yang disusun ini diharapkan mampu menjadi akselerator dan dinamisator bagi upaya peningkatan kinerja aparatur.

Visi

Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil dan Makmur

Misi

Untuk mewujudkan pencapaian visi tersebut di atas disusunlah misi Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 adalah :

Misi 3 : Membangun kemandirian ekonomi bagi industri pada semua tingkatan, koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat.

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional. Sedangkan 8 agenda prioritas pembangunan Nasional (Asta Cita) terdiri dari :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energy, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1. Tujuan

Sebagai bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan dalam rangka mencapai misi tersebut di atas, tujuan yang akan dicapai Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto adalah :

1. Untuk mewujudkan misi 3 : Membangun kemandirian ekonomi bagi industri pada semua tingkatan, koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat, maka ditetapkan **tujuan** yaitu : **Meningkatnya kesejahteraan sosial**, dengan indikator tujuan **Indeks Kesejahteraan Sosial**.

3.2.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto sebagaimana diuraikan berikut.

1. Untuk mewujudkan misi dari tujuan : maka ditetapkan sasaran strategis yaitu :

- **Meningkatnya PPKS yang mandiri.**

Dengan Indikator Sasaran **Persentase PPKS yang mandiri.**

2. Sasaran Kinerja Lainnya :

- **Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel.**

Dengan Indikator Sasaran :

- Nilai SAKIP Perangkat Daerah adalah 81,10;
- Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah adalah 96%;
- Indeks Profesionalitas ASN adalah 82.

- **Optimalisasi kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah.**

Dengan Indikator Sasaran :

- Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan adalah 3 inovasi.

Adapun target kinerja dari tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto pada 2025 – 2029 adalah sebagaimana tabel berikut:

TARGET KINERJA DARI TUJUAN DAN SASARAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN MOJOKERTO

NO.	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya kesejahteraan sosial			Indeks Kesejahteraan Sosial	NA	57,50%	57,75%	58%	58,25%	58,50%
		Meningkatnya PPKS yang mandiri		Persentase PPKS yang mandiri	NA	0,022%	0,024%	0,029%	0,034%	0,039%
			Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial aktif	NA	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentase PPKS yang mendapatkan layanan pemberdayaan sosial	NA	100%	100%	100%	100%	100%
			Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Desa yang updating SIKS-NG	NA	90%	90%	91%	92%	93%
				Persentase Penerima bansos yang memiliki embrio usaha	NA	12%	12,05%	15%	17%	20%
			Penanganan Bencana	Persentase kejadian bencana yang ditangani sesuai standar tanggap darurat	NA	100%	100%	100%	100%	100%

				Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial aktif	NA	100%	100%	100%	100%	100%
			Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial yang sesuai standar	NA	0,21%	0,21%	0,50%	1,00%	1,25%
			Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	NA	100%	100%	100%	100%	100%

3.3. Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan

Dalam upaya meningkatkan dan menciptakan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran, maka disusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2026. Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Sosial merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto.

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto didukung oleh 6 (enam) program 12 (dua belas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan.

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 sebagaimana yang tertuang di dalam Perjanjian Kinerja dalam mendukung kinerja lainnya adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pencapaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah Persentase Capaian Kinerja Program, dengan rencana Rp. 6.309.020.690,-.

Kegiatan :

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Dengan indikator kinerja kegiatan Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun, dengan rencana anggaran Rp. 17.024.200,- dan target kinerja 90%.

Sub. Kegiatan :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Indikator kinerja sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan rencana anggaran Rp. 8.512.100,- dengan target kinerja 9 dokumen;

2) Kinerja Perangkat Daerah.

Indikator kinerja sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan rencana anggaran Rp. 8.512.100,- dengan target kinerja 10 laporan.

Kegiatan :

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dengan indikator kinerja kegiatan Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah, dengan rencana anggaran Rp. 4.751.026.000,- dengan target kinerja 96,15%.

Sub. Kegiatan :

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN, dengan rencana anggaran Rp. 4.751.026.000,- dengan target kinerja 40 Orang/12 Bulan.

Kegiatan :

c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan indikator kinerja kegiatan Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan, dengan rencana anggaran Rp. 347.595.840,- dengan target kinerja 90%.

Sub. Kegiatan :

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan, dengan rencana anggaran Rp. 225.000.000,- dengan target kinerja 12 laporan.

2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan, dengan rencana anggaran Rp. 122.595.840,- dengan target kinerja 12 laporan.

Kegiatan :

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Dengan indikator kinerja kegiatan Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan dengan rencana anggaran Rp. 386.341.950,- dengan target kinerja 90%.

Sub. Kegiatan :

- 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan, dengan rencana anggaran Rp. 100.000.000,- dengan target kinerja 12 paket.
- 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan, dengan rencana anggaran Rp. 50.000.000,- dengan target kinerja 12 paket.
- 3) Penyediaan Bahan/Material
Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Bahan/Material adalah Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan, dengan rencana anggaran Rp. 156.341.950,- dengan target kinerja 12 paket.
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan adalah Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan, dengan rencana anggaran Rp. 20.000.000,- dengan target kinerja 12 paket.
- 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Indikator kinerja sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan rencana anggaran Rp. 60.000.000,- dengan target kinerja 12 laporan.

Kegiatan :

- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Dengan indikator kinerja kegiatan Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik, dengan rencana anggaran Rp. 807.032.700,- dengan target kinerja 90%.

Sub. Kegiatan :

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan adalah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang

Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya, dengan rencana anggaran Rp. 206.441.350,- dengan target kinerja 13 unit.

- 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator kinerja sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya adalah Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi, dengan rencana anggaran Rp. 90.000.000,- dengan target kinerja 8 unit.

- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator kinerja sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya adalah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan rencana anggaran Rp. 510.591.350,- dengan target kinerja 5 unit.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tersebut digunakan untuk mendukung kinerja lainnya pada Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 5 (lima) kegiatan dan 12 (dua belas) sub kegiatan.

Dengan anggaran Rp. 6.309.020.690,- dengan target kinerja 90%.

Sedangkan untuk menjalankan kinerja sasaran strategis, Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto didukung oleh Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan sebagai berikut :

1) Program Pemberdayaan Sosial

Program Pemberdayaan Sosial memiliki 2 (dua) indikator kinerja program, dan 2 (dua) indikator kinerja kegiatan dengan total rencana anggaran sebesar Rp. 228.131.319,- dan capaian kinerja 65%.

- 1.1. Pencapaian kinerja Program Pemberdayaan Sosial yang pertama adalah Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial aktif, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 194.510.360,- dan capaian kinerja 65%.

Kegiatan :

- a) Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.

Pencapaian indikator Kinerja kegiatan yang pertama adalah Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang

mendapatkan sertifikat, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 194.510.360 dan capaian kinerja 65%.

Sub. Kegiatan :

- 1) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator kinerja sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota adalah Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya (orang), dengan rencana anggaran sebesar Rp. 194.510.360 dan capaian kinerja 78 orang.

- 1.2. Dan pencapaian kinerja Program Pemberdayaan Sosial yang kedua adalah Persentase PPKS yang mendapatkan layanan pemberdayaan sosial, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 33.620.959,- dan capaian kinerja 65%.

Kegiatan :

- a) Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.

Pencapaian indikator Kinerja kegiatan yang kedua adalah Persentase PPKS yang mendapatkan fasilitasi pengembangan usaha, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 33.620.959,- dan capaian kinerja 65%.

Sub. Kegiatan :

- 1) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator kinerja sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota adalah Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 33.620.959,- dan capaian kinerja 90 lembaga.

Pada Program Pemberdayaan Sosial tersebut digunakan untuk pemberdayaan/pembinaan bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yaitu

Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Lembaga. Program Pemberdayaan Sosial ini mendukung ***Program Unggulan Bupati Peduli PPKS dan Milenial Kreatif***.

Dengan total rencana anggaran Program Pemberdayaan Sosial sebesar Rp. 228.131.319,- dan capaian kinerja 65%.

2) Program Rehabilitasi Sosial

Pencapaian kinerja program rehabilitasi sosial adalah Persentase PPKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial yang sesuai standar, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 1.843.036.300,- dan capaian kinerja 45%.

Kegiatan:

- a) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.

Pencapaian indikator Kinerja kegiatan ini adalah Persentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 1.643.435.150,- dan capaian kinerja 45%.

Sub. Kegiatan :

- 1) Penyediaan Permakanan

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Permakanan adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 700.000.000,- dan capaian kinerja 750 orang;

- 2) Penyediaan Sandang

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Sandang adalah Jumlah Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten / Kota, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 196.346.600,- dan capaian kinerja 50 orang;

- 3) Penyediaan Alat Bantu

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Alat Bantu adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 196.152.400,- dan capaian kinerja 53 orang;

- 4) Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga

Indikator kinerja sub kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga adalah Jumlah Orang yang

Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- dan capaian kinerja 15 orang;

- 5) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
Indikator kinerja sub kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial adalah Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 450.000.000,- dan capaian kinerja 50 orang;
- 6) Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
Indikator kinerja sub kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat adalah Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 4.030.300,- dan capaian kinerja 10 orang;
- 7) Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
Indikator kinerja sub kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten / Kota, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 4.402.600,- dan capaian kinerja 15 orang;
- 8) Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
Indikator kinerja sub kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 11.255.000,- dan capaian kinerja 15 orang;
- 9) Pemberian Layanan Kedaruratan
Indikator kinerja sub kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan

Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten / Kota, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 66.248.250,- dan capaian kinerja 20 orang.

Kegiatan:

- b) Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.

Pencapaian indikator Kinerja kegiatan ini adalah Persentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 199.601.150,- dan capaian kinerja 45%.

Sub. Kegiatan :

- 1) Penyediaan Permakanan

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Permakanan adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 195.296.900,- dan capaian kinerja 196 orang;

- 2) Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak

Indikator kinerja sub kegiatan Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak adalah Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten / Kota, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 4.304.250,- dan capaian kinerja 15 orang.

Pada Program Rehabilitasi Sosial tersebut digunakan untuk mendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM). Program Rehabilitasi Sosial ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yaitu kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dan kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial. Yang mana pada kegiatan pertama ada 9 (sembilan) sub kegiatan sedangkan pada kegiatan kedua ada 2 (dua) sub kegiatan. Program Rehabilitasi Sosial ini mendukung **Mendukung SPM dan Program Bupati PEDULI PPKS.**

Dengan total rencana anggaran Program Rehabilitasi Sosial sebesar Rp. 1.843.036.300,- dan capaian kinerja 45%.

3) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial memiliki 2 (dua) indikator kinerja program, dan 2 (dua) indikator kinerja kegiatan dengan total rencana anggaran sebesar Rp. 7.774.415.740,- dan capaian kinerja 55%.

3.1. Pencapaian kinerja Program Perlindungan dan Jaminan Sosial yang pertama adalah Persentase Desa yang updating SIKS-NG, dengan rencana anggaran Rp. 7.726.580.740,- dan capaian kinerja 55%.

Kegiatan :

- a) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang pertama adalah Persentase Data kesejahteraan sosial yang terverifikasi dan tervalidasi sesuai standar, dengan rencana anggaran Rp. 7.726.580.740,- dan capaian kinerja 55%.

Sub. Kegiatan :

- 1) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja sub kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota adalah Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota, dengan rencana anggaran Rp. 142.737.240,- dan capaian 215.000 keluarga.

- 2) Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dengan pencapaian indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota, dengan rencana anggaran Rp. 7.583.843.500,- dan capaian 1.764.000 keluarga.

3.2. Sedangkan pencapaian kinerja Program Perlindungan dan Jaminan Sosial yang kedua adalah Persentase Penerima bansos yang memiliki embrio usaha, dengan rencana anggaran Rp. 47.835.000,- dan capaian 55%.

Kegiatan :

- a) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.

Pada pencapaian indikator Kinerja kegiatan yang kedua adalah Persentase PPKS yang berwirausaha mandiri, dengan rencana anggaran Rp. 47.835.000,- dan capaian 20 orang.

Sub. Kegiatan :

2) Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Indikator kinerja sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota, terealisasi 9,80% dengan capaian kinerja 50%.

Pada Program Perlindungan dan Jaminan Sosial tersebut digunakan untuk Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Tujuan DBHCHT adalah : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Mendukung kesehatan, Pengembangan ekonomi, Pengawasan produksi dan peredaran tembakau. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan 2 (dua) indikator kinerja kegiatan, pada kegiatan yang pertama ada 2 (dua) sub kegiatan sedangkan pada indikator kinerja kegiatan yang kedua ada 1 (satu) sub kegiatan. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial ini mendukung ***Program Unggulan Bupati Perempuan Berkarya, Gercep Stunting dan Peduli PPKS (Masyarakat Miskin, Disabilitas Dan Lansia).***

Dengan total anggaran Program Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar Rp. 7.774.415.740,- dan dengan capaian kinerja 55%.

Anggaran Rp. 7.774.415.740,- tersebut digunakan untuk :

1. DBHCHT	: Rp. 7.409.971.320,-
2. PKH	: Rp. 210.000.000,-
3. Bansos/BPNT	: Rp. 40.000.000,-
4. Pendataan PPKS	: Rp. 25.000.000,-
5. PKH Banmas	: Rp. 89.444.420,-

4) Program Penanganan Bencana

Program Penanganan Bencana juga memiliki 2 (dua) indikator kinerja program, dan 2 (dua) indikator kinerja kegiatan dengan total rencana anggaran sebesar Rp. 198.091.600,- dan capaian kinerja 50%.

4.1. Pencapaian kinerja Program Penanganan Bencana yang pertama adalah Persentase kejadian bencana yang ditangani sesuai standar tanggap darurat, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 170.000.000,- dan capaian kinerja 50%.

Kegiatan :

- a) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

Pencapaian indikator Kinerja kegiatan ini adalah Persentase PPKS korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada masa bencana sesuai standar, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 170.000.000,- dan capaian kinerja 50%.

Sub. Kegiatan :

- 1) Penyediaan Makanan

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Makanan adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota, rencana anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- dan capaian kinerja 10.000 orang;

- 2) Penyediaan Sandang

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Sandang adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia Pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota, rencana anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- dan capaian kinerja 10.000 orang;

- 3) Pelayanan Dukungan Psikososial

Indikator kinerja sub kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial adalah Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/ Kota, rencana anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- dan capaian kinerja 10.000 orang.

- 4.2. Pencapaian kinerja Program Penanganan Bencana yang kedua adalah Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial aktif, rencana anggaran sebesar Rp. 28.091.600,- dan capaian kinerja 50%.

Kegiatan :

- a) Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota.

Pencapaian indikator Kinerja kegiatan ini adalah Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan sertifikat, rencana anggaran sebesar Rp. 28.091.600,- dan capaian kinerja 50%.

Sub. Kegiatan :

1) Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

Indikator kinerja sub kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana adalah Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana, rencana anggaran sebesar Rp. 28.091.600,- dan capaian kinerja 50%.

Pada Program Penanganan Bencana tersebut digunakan untuk mendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM). Program Penanganan Bencana ini terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja program. Pada indikator kinerja program yang pertama ada 1 (satu) kegiatan, yaitu kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota dengan 3 (tiga) sub kegiatan. Sedangkan pada indikator kinerja program yang kedua ada kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota dengan 1 (satu) sub kegiatan. Tujuan dari Program Penanganan Bencana adalah untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana, mengurangi resiko bencana, dan meminimalkan dampak bencana. Program Penanganan Bencana ini mendukung ***Mendukung SPM dan Program Bupati PEDULI PPKS.***

Dengan total rencana anggaran Program Penanganan Bencana sebesar Rp. 198.091.600,- dengan capaian kinerja 50%.

5) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Sasaran dari Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan adalah Meningkatnya kualitas pemeliharaan Taman Makam Pahlawan. Pencapaian kinerja Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan adalah Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- dan capaian kinerja 100%.

Kegiatan :

a) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota

Pencapaian indikator Kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Taman Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- dan capaian kinerja 6 makam.

Sub. Kegiatan :

1) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota

Indikator kinerja sub kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota adalah Jumlah Taman Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- dan capaian kinerja 6 makam.

Pada Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan tersebut bertujuan untuk memelihara Taman Makam Pahlawan. Pada program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan. Dengan total rencana anggaran Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan sebesar Rp. 15.000.000,- dan capaian kinerja 100%.

Total anggaran yang dikelola oleh Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto sebesar Rp. 16.367.695.649,- dengan capaian kinerja 95%.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027 dapat di uraikan pada Tabel TC-33 sebagai berikut :

Tabel TC-33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS SOSIAL TAHUN 2026
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027
KABUPATEN MOJOKERTO

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
					Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Dinas Sosial	81,10				81,15	
						Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		96,15%				96,20%	
						Indeks Profesionalitas ASN		81,05				81,10	
					Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi Yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi		1				1	
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Program	Dinas Sosial	90%	6.309.020.719	P-APBD		90%	6.869.733.285
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun		90%	17.024.200			90%	20.000.000
1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		9 Dokumen	8.512.100			9 Dokumen	10.000.000
1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		10 Laporan	8.512.100			10 Laporan	10.000.000

1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		96,15%	4.751.026.000	P-APBD		96,20%	5.226.128.600
1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		40 Orang/ Bulan	4.751.026.000			40 Orang/ Bulan	5.226.128.600
1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah		81,05	0	P-APBD		81,10	0
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan		90%	386.341.950	P-APBD		91%	468.976.145
1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Paket	100.000.000			12 Paket	110.000.000
1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 Paket	50.000.000			12 Paket	82.500.000
1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		12 Paket	20.000.000			12 Paket	22.000.000
1	06	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan / Material yang Disediakan		12 Paket	156.341.950			12 Paket	171.976.145
1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	60.000.000			12 Laporan	82.500.000
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan		90%	347.595.840	P-APBD		91%	347.595.840
1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	225.000.000			12 Laporan	225.000.000
1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	122.595.840			12 Laporan	122.595.840
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik		90%	807.000.000	P-APBD		90%	807.000.000
1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		13 Unit = 17 Unit (4 unit Mobil Pinjam pakai dari Kemensos)	206.441.350			13 Unit = 17 Unit (4 unit Mobil Pinjam pakai dari Kemensos)	206.441.350

1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi		1 Unit	90.000.000			1 Unit	90.000.000
1	06	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi		8 Unit	510.591.350			8 Unit	510.591.350
					Meningkatnya PPKS yang mandiri	Persentase PPKS yang mandiri	Dinas Sosial	0,024%	10.058.674.959	P-APBD		0,024%	11.267.495.375
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial aktif		1005%	228.131.319	P-APBD		100%	412.131.636
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan sertifikat		100%	194.527.606	P-APBD		100%	235.908.996
1	06	02	2.03	0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya (orang)		78 Orang	194.510.360			78 Orang	235.908.996
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan fasilitasi pengembangan usaha		100%	33.620.959	P-APBD		100%	176.222.640
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan sertifikat		100%	33.620.959	P-APBD		100%	176.222.640
1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten / Kota		90 Lembaga	33.620.959			90 Lembaga	176.222.640
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial yang sesuai standar		0,21%	1.843.036.300	P-APBD		0,50%	2.082.629.065
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial		0,17%	1.643.435.150	P-APBD		0,17%	1.856.802.475

1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota		750 Orang	700.000.000			850 Orang	797.500.000
1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten / Kota		50 Orang	196.346.600			50 Orang	215.981.260
1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten / Kota		53 Orang	196.152.400			55 Orang	220.167.640
1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		15 Orang	15.000.000			15 Orang	16.500.000
1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota		50 Orang	450.000.000			50 Orang	506.000.000
1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota		10 Orang	4.030.300			10 Orang	5.500.000
1	06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten / Kota		15 Orang	4.402.600			15 Orang	5.500.000
1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota		15 Orang	11.255.000			15 Orang	12.380.500
1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten / Kota		20 Orang	66.248.250			20 Orang	77.273.075
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial		0,04%	199.601.150	P-APBD		0,10%	225.826.590
1	06	04	2.02	0003	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota		196 Orang	195.296.900			196 Orang	220.326.590

1	06	04	2.02	0009	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan / atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosisal (PMKS) Lainnya di Luar HIV / AIDS Kewenangan Kabupaten / Kota		15 Orang	4.304.250			15 Orang	5.500.000
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Desa yang updating SIKS-NG		90%	7.774.415.740	P-APBD		91%	8.701.457.314
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data kesejahteraan sosial yang terverifikasi dan tervalidasi sesuai standar		5%	7.726.580.740	P-APBD		6%	8.508.038.814
1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten / Kota		215.000 Keluarga	142.737.240			215.000 Keluarga	165.810.964
1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota		1.764.000 Keluarga	7.583.843.500			222.430 Keluarga,	8.342.227.850
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penerima bansos yang memiliki embrio usaha		12,05%	47.835.000	P-APBD		15%	193.418.500
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PPKS yang berwirausaha mandiri		0,024%	47.835.000	P-APBD		0,029%	193.418.500
1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota		20 Orang	47.835.000			20 Orang	193.418.500
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase kejadian bencana yang ditangani sesuai standar tanggap darurat		100%	198.091.600	P-APBD		100%	231.000.000
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase PPKS korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada masa bencana sesuai standar		100%	170.000.000	P-APBD		100%	187.000.000
1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari Dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten / Kota		10.000 Orang	150.000.000			10.000 Orang	165.000.000

1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia Pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota		10.000 Orang	10.000.000			10.000 Orang	11.000.000
1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/ Kota		10.000 Orang	10.000.000			10.000 Orang	11.000.000
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial aktif		100%	28.091.600	P-APBD		100%	44.000.000
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan sertifikat		100%	28.091.600	P-APBD		100%	44.000.000
1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota		46 Orang	28.091.600			50 Orang	44.000.000
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik		100%	15.000.000	P-APBD		100%	15.000.000
1	06	07	2.01		Pemeeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah Taman Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten / Kota		6 Makam	15.000.000	P-APBD		6 Makam	15.000.000
1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah Taman Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten / Kota		6 Makam	15.000.000			6 Makam	15.000.000
TOTAL									16.367.695.649				18.313.451.300

Data Dinas Kabupaten Mojokerto

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

Rancangan Akhir Rencana Kerja (RANKIR RENJA) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rangkaian Rancangan Akhir Rencana Kerja diawali dengan melakukan pengelolaan perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah. Di dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja mengemukakan secara eksplisit rencana kerja program, kegiatan dan sub. kegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi kinerja perangkat daerah tahunan. Rancangan Akhir Rencana Kerja dan pendanaan perangkat daerah mencakup program, kegiatan, sub. Kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan. Adalah dokumen rencana yang memuat program, kegiatan dan sub. kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Rancangan Akhir Rencana Kerja dan pendanaan perangkat daerah berpedoman pada Rentsra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja dan pendanaan Perangkat Daerah harus memperhatikan dan menganalisa rencana kerja beserta pendanaannya berdasarkan capaian kinerja yang telah di laksanakan. Disamping itu, Perangkat Daerah mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja pemerintah daerah melalui program, kegiatan dan sub. kegiatan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Perangkat Daerah. Pengukuran kinerja Perangkat Daerah akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja serta target kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Perangkat Daerah. Hal ini mengingat rencana kerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi Perangkat Daerah yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja Perangkat Daerah pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran Perangkat Daerah dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, rencana yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja Perangkat Daerah, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan untuk kerja Perangkat Daerah secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja Perangkat Daerah tersebut maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan Perangkat Daerah, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja dan target kinerja program pembangunan Perangkat Daerah.

Secara rinci, rumusan perubahan rencana program, kegiatan dan sub. kegiatan pembangunan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2026, dapat diuraikan sebagaimana tabel 4.1. berikut :

Tabel 4.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026
KABUPATEN MOJOKERTO

KODE SKPD : 1.06.6.01.01
NAMA SKPD : DINAS SOSIAL

No.	KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	UP	B/L	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			LOKASI	APBD KAB (Rp).	APBD PROV		USULAN APBN		
					OUTPUT	OUTCOME	TARGET			OPD Terkait	Pagu (Rp)	KL	Rp.	D/TB/ DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<u>TUJUAN :</u> Meningkatnya kesejahteraan sosial			<u>INDIKATOR TUJUAN :</u> Indeks Kesejahteraan Sosial									
		<u>SASARAN LAINNYA :</u> Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel			Nilai SAKIP	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,10	Dinas Sosial						
					Persentase Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	96,15%	Dinas Sosial						
					IP ASN	IP ASN Perangkat Daerah	81,05	Dinas Sosial						

		Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah				Jumlah Inovasi Yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi	Jumlah Inovasi Yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi	3	Dinas Sosial						
	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Capaian Kinerja Program		90%	Dinas Sosial	6.309.020.690					
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			L	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun		90%	Dinas Sosial	17.024.200					
	1.06.01.2.01.0001	1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		L	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyediaan dokumen : 1. Rancangan Awal Renja; 2. Rancangan Renja; 3. Rancangan Akhir Renja; 4. Renja; 5. Rancangan Perubahan; 6. Perubahan Renja; 7. Rancangan dan Reviuw Renstra; 8. PK APBD; 9. PK PAPBD.	9 Dokumen		8.512.100	-	0	-	0	-
	1.06.01.2.01.0007	2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		L	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyediaan Laporan : 1. SPM; 2. LPPD; 3. LKJIP;	10 Laporan		8.512.100	-	0	-	0	-

							4. LKPJ; 5. AKSARA; 6. SAKIP; 7. Satu Data Palapa; 8. SPIP; 9. KKS; 10. SDG's.								
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			L	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		96,15%	Dinas Sosial	4.751.026.000					
	1.06.01.2.02.0001	1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		L	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Anggaran Penyediaan Gaji + Gaji 13 dan 14 ASN dan Tunjangan	40 Orang/ Bulan		4.751.026.000	-	0	-	0	-
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			L	IP ASN Perangkat Daerah		81,05	Dinas Sosial	0					
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			L	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan		90%	Dinas Sosial	386.341.950					
	1.06.01.2.06.0002	1.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		L	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan: TV 3,PC 5, Printer 5, CCTV UPT 4, CCTV kantor dinas 12, speaker wireless 2, meubeler, AC,	12 Paket		100.000.000	-	0	-	0	-

							Perabot kantor, perabot/alat rumah tangga, kursi rapat									
	1.06.01.2.06.0004	2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		L	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Alat Tulis Kantor - Jenis ATK yang Disediakan : Kertas, Tinta, Ballpoint dll	12 Paket		50.000.000	-	0	-	0	-	
	1.06.01.2.06.0005	3.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		L	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Paket		20.000.000	-	0	-	0	-	
	1.06.01.2.06.0007	4.	Penyediaan Bahan / Material		L	Jumlah Paket Bahan / Material yang Disediakan	Penyediaan Alat Tulis Kantor - Jenis ATK yang Disediakan : Kertas, Tinta, Ballpoint dll	12 Paket		156.341.950	-	0	-	0	-	
	1.06.01.2.06.0009	5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		L	Jumlah Laporan Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas Pegawai Selama 1 Tahun	12 Laporan		60.000.000	-	0	-	0	-	
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			L	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan		90%	Dinas Sosial	347.595.840						

	1.06.01.2.08.0002	1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		L	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Biaya Telepon dan Internet Dinas Sosial, UPT dan Rumah Aman; Biaya Listrik Kantor Dinas Sosial, UPT dan Rumah Aman; dan Biaya Air PAM Dinas Sosial, UPT dan Rumah Aman	12 Laporan		225.000.000	-	0	-	0	-
	1.06.01.2.08.0004	2.	Penyedeiaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		L	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Biaya Tenaga Kerja Pembantu Administrasi Kantor selama 12 Bulan	12 Laporan		122.595.840	-	0	-	0	-
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			L	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik		90%	Dinas Sosial	807.032.700					
	1.06.01.2.09.0002	1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		L	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional; dan Penyediaan Biaya Perizinan dan Pajak Kendaraan Dinas / Operasional	13 Unit = 17 Unit (4 unit Mobil Pinjam pakai dari Kemensos)		206.441.350	-	0	-	0	-

	1.06.01.2.09.0009	2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		L	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Penyediaan Biaya Renovasi Gedung Kantor; Biaya Renovasi UPT; Biaya Pemeliharaan Berkala Rumah Aman; dan Biaya Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor	1 Unit		510.591.350	-	0	-	0	-
	1.06.01.2.09.0010	3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		L	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Penyediaan Biaya Pemeliharaan Berkala Sarana, Prasarana Perlengkapan / Peralatan Kantor (AC, PC, Laptop, Printer sebanyak 5 Unit)	8 Unit		90.000.000	-	0	-	0	-
		SASARAN : Meningkatnya PPKS yang mandiri				INDIKATOR SASARAN : Persentase PPKS yang mandiri		0,024%	Dinas Sosial	10.058.674.959					
	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial aktif		100%	Dinas Sosial	228.131.319					

	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan sertifikat		100%	Dinas Sosial	194.510.360					
	1.06.02.2.03.0001	1.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota		L	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya (orang)	Pembinaan dan Pemberdayaan PSM, TKSK - Pemberian Baju Kerja PSM	78 Orang		194.510.360	-	0	-	0	-
	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				Persentase PPKS yang mendapatkan layanan pemberdayaan sosial		100%	Dinas Sosial	33.620.959					
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				Persentase PPKS yang mendapatkan fasilitasi pengembangan usaha		100%	Dinas Sosial	33.620.959					
	1.06.02.2.03.0004	1.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		L	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten / Kota	Pembinaan dan Pemberian Bantuan Anak Yatim dalam LKSA (BOP Pembinaan LKSA : Mamin Rapat 2 X per semester,	90 Lembaga		33.620.959	-	0	-	0	-

							Bantuan Transport); dan Pembinaan Karang Taruna (Operasional Karang Taruna Kabupaten dan Bantuan Karang Taruna Desa)								
	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				Persentase PPKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial yang sesuai standar		0,21%	Dinas Sosial	1.843.036.300					
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				Persentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial		0,17%	Dinas Sosial	1.643.435.150					
	1.06.04.2.01.0001	1.	Penyediaan Permakanan		L	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota	Pemberian permakanan bagi PPKS	750 Orang		700.000.000	-	0	-	0	-

	1.06.04.2.01.0002	2.	Penyediaan Sandang		L	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten / Kota	Pemberian sandang bagi PPKS	50 Orang		196.346.600	-	0	-	0	-
	1.06.04.2.01.0003	3.	Penyediaan Alat Bantu		L	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten / Kota	Pemberian Alat Bantu bagi PPSK	53 Orang		196.152.400	-	0	-	0	-
	1.06.04.2.01.0004	4.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		L	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemulangan Orang Terlantar Ke Daerah Asal dan Operasional Tim Reaksi Cepat (TRC)	15 Orang		15.000.000	-	0	-	0	-
	1.06.04.2.01.0005	5.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		L	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial bagi PPKS	50 Orang		450.000.000	-	0	-	0	-
	1.06.04.2.01.0006	6.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak		L	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas	Pemberian Bimbingan Sosial bagi PPKS	10 Orang		4.030.300	-	0	-	0	-

			Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat			Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota									
	1.06.04.2.01.0008	8.	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten / Kota	Fasilitasi Pemberian layanan dasar dan kesehatan bagi PPKS	15 Orang		4.402.600	-	0	-	0	-
	1.06.04.2.01.0009	9.	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemberian layanan data dan pengaduan bagi PPKS	15 Orang		11.255.000	-	0	-	0	-
	1.06.04.2.01.0010	10.	Pemberian Layanan Kedaruratan			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten / Kota	Fasilitasi Pemberian layanan kedaruratan bagi PPKS	20 Orang		66.248.250	-	0	-	0	-
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial					Persentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	0,04%	Dinas Sosial	199.601.150					

	1.06.04.2.02.0003	1.	Penyediaan Permakanan			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota	Pemberian Bantuan Permakanan kepada Eks penderita kusta di Sumberglagah	196 Orang		195.296.900	-	0	-	0	-
	1.06.04.2.01.0007	2.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten / Kota	Fasilitasi Pemberian layanan sosial bagi PPKS	15 Orang		4.304.250	-	0	-	0	-
	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				Persentase Desa yang updating SIKS- NG		90%	Dinas Sosial	7.774.415.740					
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				Persentase Data kesejahteraan sosial yang terverifikasi dan tervalidasi sesuai standar		5%	Dinas Sosial	7.726.580.740					

	1.06.05.2.02.0002	1.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		L	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten / Kota	Updating DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial); Updating Data PBI (Penerima Bantuan Iuran) BPJS dan KISDA; Updating PPKS dan PSKS PPKS Terdiri dari 26 Item Jenis (Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial)diantaranya Anak Jalanan, Penyandang Disabilitas, Orang Tua Terlantar Dll)(Pembuatan Aplikasi By Name By Address Geo Taging)	215.000 Keluarga		142.737.240	-	0	-	0	-
	1.06.05.2.02.0003	3.	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		L	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	DBHCHT, BPNT Pusat dan Daerah, PKH	1.764.000 Keluarga		7.583.843.500	-	0	-	0	-
	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				Persentase Penerima bansos yang memiliki embrio usaha		12,05%	Dinas Sosial	47.835.000					

	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				Persentase PPKS yang berwirausaha mandiri		0.024%	Dinas Sosial	47.835.000				
	1.06.05.2.02.0004	1.	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat			Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	20 Orang		47.835.000	-	0	-	0 -
	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA				Persentase kejadian bencana yang ditangani sesuai standar tanggap darurat		100%	Dinas Sosial	198.091.600				
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				Persentase PPKS korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada masa bencana sesuai standar		100%	Dinas Sosial	170.000.000				

	1.06.06.2.01.0001	1.	Penyediaan Makanan		L	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari Dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten / Kota	Penyediaan Dapur Umum saat Tanggap Darurat Bencana	5.000 Orang		150.000.000	-	0	-	0	-
	1.06.06.2.01.0002	2.	Penyediaan Sandang			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia Pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota	Penyediaan sandang bagi korban bencana alam dan sosial	5.000 Orang		10.000.000	-	0	-	0	-
	1.06.06.2.01.0005	3.	Pelayanan Dukungan Psikososial		L	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/ Kota	Fasilitasi pelayanan dukungan psikososial bagi korban bencana alam dan sosial	5.000 Orang		10.000.000	-	0	-	0	-

	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA				Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial aktif		100%	Dinas Sosial	28.091.600					
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan sertifikat		100%	Dinas Sosial	28.091.600					
	1.06.06.2.02.0002	1.	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		L	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	Pembinaan dan Pemantapan Tagana dalam Kesiap Siagaan Bencana (Pelatihan Peningkatan Kapasitas Dalam Tanggap Darurat Bencana)	46 Orang		28.091.600	-	0	-	0	-
	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik		100%	Dinas Sosial	15.000.000					
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota				Jumlah Taman Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten / Kota		6 Makam	Dinas Sosial	15.000.000					

	1.06.07.2.01.0002	1.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota			Jumlah Taman Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/ Kota	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	6 Makam		15.000.000	-	0	-	0	-
JUMLAH										16.367.695.649	-	0	-	0	-

RSK RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB. KEGIATAN DINAS SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2026
DENGAN PAGU SEMENTARA SEBAGAIMANA PADA APLIKASI SIPD
KABUPATEN MOJOKERTO

No.	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINRJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	RINCIAN PENGUNAAN	TARGET	SUMBER DANA	LOKASI	KETERANGAN	DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM / PROGRAM PRIORITAS BUPATI
	6					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	6	0	6			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		16.367.695.649						
	6	0	0	2.01	0001	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	6.309.020.690		81,10	DAU	DINAS SOSIAL		
							Jumlah Dokumen Perencanaan							

		6	0	0	2.02	000		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.512.100	Penyusunan Ranwal Renja, Rancangan Renja, Rankhir Renja, Renja, Rancaangan Perubahan, Perubahan Renja, Rancangan Renstra, Perjakin APBD dan P-APBD	9 Dokumen	DAU	DINAS SOSIAL		
									Rincian :								
									Jilid 3 Buku x Rp. 6.700		20.100						
									Photo Copy 1.292 Lembar x Rp. 400		516.800						
									Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur 3 Orang ASN x Rp. 325.000		975.000						
									Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur 2 Orang Non ASN x Rp. 250.000		500.000						
									Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota 65 Orang x Rp. 100.000		6.500.000						
									Pembulatan		200						

	6	0	0	2.02	000		2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.512.100	Penyusunan Laporan SPM, LPPD, LKJIP, LKPJ, AKSARA, SAKIP, Satu Data Palapa, SPIP, KKS, SDG's.	10 Laporan	DAU	DINAS SOSIAL		
								Rincian :								
								Jilid 3 Buku x Rp. 6.700		20.100						
								Photo Copy 1.292 Lembar x Rp. 400		516.800						
								Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur 3 Orang ASN x Rp. 325.000		975.000						
								Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur 2 Orang Non ASN x Rp. 250.000		500.000						
								Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota 65 Orang x Rp. 100.000		6.500.000						
								Pembulatan		200						
	6	0	0	2.02			2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	4.751.026.000		96,15%	DAU	DINAS SOSIAL		

									Perangkat Daerah								
	6	0	0	2.02	000	1	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4.751.026.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	DAU	DINAS SOSIAL			
								Rincian :									
								Belanja Gaji Pokok PNS (1 Tahun)		1.869.149.000							
								Belanja Gaji Pokok PPPK (1 Tahun)		64.072.000							
								Belanja Tunjangan Keluarga PNS (1 Tahun)		174.739.000							
								Belanja Tunjangan Keluarga PPPK (1 Tahun)		8.971.000							
								Belanja Tunjangan Jabatan PNS (1 Tahun)		119.902.000							
								Belanja Tunjangan Fungsional PNS (1 Tahun)		90.951.000							
								Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS (1 Tahun)		32.414.000							
								Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK (1 Tahun)		3.700.000							
								Belanja Tunjangan Beras PNS (1 Tahun)		87.345.000							
								Belanja Tunjangan Beras PPPK (1 Tahun)		5.794.000							

								Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS (1 Tahun)		10.029.000							
								Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK (1 Tahun)		1.000.000							
								Belanja Pembulatan Gaji PNS (1 Tahun)		171.000							
								Belanja Pembulatan Gaji PPPK (1 Tahun)		50.000							
								Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS (1 Tahun)		4.486.000							
								Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK (1 Tahun)		154.000							
								Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS (1 Tahun)		13.458.000							
								Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK (1 Tahun)		462.000							
								Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS (1 Tahun)		9.346.000							
								Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK (1 Tahun)		321.000							
								Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS (1 Tahun)		2.156.280.000							

							Bendahara Pengeluaran Atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai Pagu Dana Di Atas Rp. 10 Miliar Sd. Rp. 25 M... (12 Bulan)		13.080.000							
							Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Ppk Skpd) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana Di Atas Rp. 10 Miliar Sd. Rp. 25 M... (12 Bulan)		15.000.000							
							Pembantu Bendahara Pengeluaran Spesifikasi : Diatas 10 M s/d 25 M (12 Bulan)		5.232.000							
							Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Spesifikasi : Diatas 10 M s/d 25 M (2 Orang/ 24 Bulan)		22.500.000							
							Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Ppkd)/ Kuasa Pengguna Anggaran (Kpa) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana Di Atas Rp. 10		36.120.000							

							Miliar Sd. Rp. 25 M... (12 Bulan)									
							Pengurus Barang Pengguna Spesifikasi : Diatas 10 M s/d 25 M (12bulan)		6.300.000							
	6	0	0	2.06		3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	386.341.950		90%	PAD	DINAS SOSIAL			
	6	0	0	2.06	000 2	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100.000.000	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Paket	PAD	DINAS SOSIAL			
							Rincian :									
							AIO Desktop PC Operator 1 Unit x 13.603.000		13.603.000							
							Laptop Administrasi 2 Unit x 13.095.500		26.191.000							
							Printer All-in-One Functions: Print, Scan, Copy 1 Unit x 3.560.400		3.560.400							
							Scanner Meja 1 Unit x 2.073.600		2.073.600							

								Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) Spesifikasi : 1000 Kotak (1 Kotak x Rp. 20.000)		20.000.000						
								Biaya Konsumsi (Makan) Spesifikasi : 1000 Kotak (1 Kotak x Rp. 30.000)		30.000.000						
	6	0	0	2.06	000		3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20.000.000	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Paket	PAD	DINAS SOSIAL		
								Rincian :								
								Amplop Spesifikasi : Dengan Kop (402 Lembar, 1 Lembar x Rp. 3.900)		1.567.800						
								Map Dinas (910 Buah, 1 Buah x Rp. 7.800)		7.098.000						
								Kertas Kop Spesifikasi : A4/F4/Quarto (19 Rim, 1 Rim x Rp. 233.100)		4.428.900						
								Lembar Disposisi Spesifikasi : Kertas Hvs 70 Gsm Uk1/2 Folio Cetak 1 Muka Isi 100... (4 Rim, 1 Rim x Rp. 41.650)		166.600						
								Photo Copy Spesifikasi : Folio/hvs Rp. 16.844 Lembar (1 Lembar x Rp. 400)		6.737.600						

							Pembulatan		1.100						
	6	0	0	2.06	000	4	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	156.341.950	Tersedianya Bahan/Material	12 Paket	PAD	DINAS SOSIAL		
							Rincian :								
							Amplop Putih Spesifikasi : Uk 114x160mm 22 dos x 27.750		610.500						
							Amplop Putih Spesifikasi : Uk 95x150mm 38 dos x 26.650		1.012.700						
							Tinta Stempel 50 Cc 18 Botol x 18.500.		333.000						
							Ordner Besar 26 Buah x 37.750		981.500						
							Ballpoint Tulis 207 Buah x 7.150		1.480.050						
							Ballpoint Tanda Tangan 12 Buah x 54.400.		652.800						
							Binder Clip Sedang 30 Pak x 15.550		466.500.						
							Binder Clip Kecil 5 Pak x 8.800.		44.000						
							Binder Clip Besar 21 Pak x 49.400.		1.037.400						
							Buku Agenda Besar 12 Buah x 92,600		1.111.200						

								Buku Block Note Isi 50 Lembar 10 Buah x 7.150		71.500						
								Buku Kwitansi Besar 548 Buku x 13.350		7.315.800						
								Buku Tulis isi 38 lembar 6 buah x 5000		30.000						
								Isi Staples kecil 100 pak x 7800		780.000						
								Isi Staples Sedang 35 pak x 37.550		1.314.250						
								Map Bufalo 506 Buah x 7.250		3.668.500						
								Map Map Plastik Zipper 10 Buah x 17.250		172.500						
								Paper Clips Kecil 15 Pak x 6.150		92.250						
								Pensil Tulis 20 Buah x 5.850		117.000						
								Snelhekte Jepit Folder One Map Jepit (Clip File) 54 Biji x 15.800		853.200						
								Snelhekte Plastik Inter X 285 Buah x 8.000		2.280.000						

								Spidol Besar 12 Buah x 16.650		199.880							
								Tipe-X / Correction Cair 5 Buah x 7.800		39.000							
								Ballpoint Tulis 180 Buah x 7.150		1.287.000							
								Buku Block Note Isi 50 Lembar 180 Buah x 7.150		1.287.000							
								Map Map Plastik Zipper 180 Buah x 17.250		3.105.000							
								Materai 10000 60 Lembar x 14.400		864.000							
								Kertas HVS Folio/F4 70Gram 529 Rim x 68.100		36.491.320							
								Kertas Hvs 70 Gram A4 6 Rim x 58.650		351.900							
								Tinta Printer Tinta Cair 70 Ml 510 Botol x 167.700		85.527.000							
								Tinta Printer Toner Hitam, 500 Gram 17 Per Bungkus x 190.100		3.231.700							

	6	0	0	2.06	000		5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000	Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	PAD	DINAS SOSIAL		
								Rincian :								
								Biaya Taksi Spesifikasi : D.K.I. Jakarta (1 Orang/Kali x Rp. 256.000)		256.000						
								Penginapan Dalam Negeri - Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : JAWA BARAT (1 orang/hari x 2.755.000)		2.755.000						
								Tiket Pesawat Kelas Ekonomi Spesifikasi : ASN dan Non ASN (1 Orang/PP x Rp. 3.000.000)		3.000.000						
								Uang Harian Dalam Negeri (Luar Kota) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA (2 Orang/Hari, 1 Orang/Hari x Rp. 530.000)		1.060.000						
								Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Fungsional Umum Golongan II/I (11		3.025.000						

							Orang/Hari, 1 Orang/Hari x Rp. 1.512.500)									
							Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Fungsional Umum Non Pegawai Negeri Sipil (5 Orang/Hari, 1 Orang/Hari x Rp. 250.000)		1.250.000							
							Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon II.b (20 Orang/Hari, 1 Orang/Hari x Rp. 400.000)		8.000.000							
							Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Pengawas Pemerintahan Madya/Aud... (15 Orang/Hari, 1 Orang/Hari x Rp. 375.000)		5.625.000							
							Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon V dan Fungsional Umum Golongan IV/I... (5		1.625.000							

							Orang/Hari, 1 Orang x Rp. 325.000)								
							Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota Spesifikasi : Full Day/Half Day (334 Orang/Hari, 1 Orang/Hari x Rp. 100.000)		33.400.000						
							Pembulatan		4.000						
	6	0	0	2.08		4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	347.595.840		90%	PAD	DINAS SOSIAL		
	6	0	0	2.08	000 2	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	225.000.000	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	PAD	DINAS SOSIAL		
							Rincian :								
							Tarif Air PDAM Spesifikasi : Kantor Pemerintah Tingkat Kabupaten/Kota/Provin... (1581 M3, 1 M3 x 8.571,42)		13.912.800						
							Tarif Listrik Prabayar 5501 s.d 53000 Spesifikasi : Golongan Tarif P-1		167.110.371						

							(113913Kwh, 1 Kwh x 1467)								
							Paket Internet,Telepon Rumah Dan Tv Interaktif Spesifikasi : 100 Mbps (12 Bulan, 1 Bulan x Rp. 1.144.700)		13.736.400						
							Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana Di Atas Rp. 5 Miliar Sd. Rp. 10 Mi... (12 Bulan, 1 Bulan x Rp. 2.520.000)		30.240.000						
							Pembulatan		429						
	6	0	0	2.08	000	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	122.595.840	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	PAD	DINAS SOSIAL		
							Rincian :								
							Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Umum Dinsos (6 orang x 12 bulan, 1 Orang/Bulan x Rp. 1.276.665)		91.946.880						
							Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Dinsos (2 Orang/12Bulan, 1 Orang/Bulan x Rp. 1.277.040)		30.648.960						

	6	0	0	2.09		5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	807.032.700		90%	PAD	DINAS SOSIAL		
	6	0	0	2.09	000 2	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	206.441.350	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit = 17 Unit (4 unit Mobil Pinjam pakai dr Kemensos)	PAD	DINAS SOSIAL		
							Bensin non subsidi (4.500 Liter, 1 Liter x Rp. 16.050)		72.225.000						
							oli mobil (37 Liter, 1 Liter x Rp. 2138.000)		8.806.000						
							Solar Spesifikasi : Non Subsidi (715 Liter, 1 Liter x Rp. 25.750)		18.411.250						
							Ban Luar Mobil Ring 16 5 Buah x 1.511.700		7.558.500						
							Ban Luar Motor Ring 17 6 Buah x 300.100		1.800.600						
							Kampas Kopling Mobil Kampas Kopling Mobil Type Mpv 4 Set x 3.471.200		13.884.800						

							Kampas Rem Depan Mobil Kampas Rem Depan Mobil Type Mpv 2 Set x 2.127.500		4.255.000							
							Accu SUV 4 Buah x 1.652.600		6.610.400							
							Pajak Stnk Kendaraan Dinas Kategori 16 1 Tahun x 2.538.000		2.538.000							
							Pajak Stnk Kendaraan Dinas Kategori 6 1 tahun x 1.202.200		1.202.200							
							Pajak Stnk Kendaraan Dinas Kategori 7 5 Tahun x 1.335.800.		6.679.000							
							Pajak Stnk Kendaraan Dinas Kategori 2 1 Tahun x 320.600		320.600							
							Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 1 Unit / Tahun x 3.650.000		3.650.000							
							Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Operasional dalam		58.500.000							

								lingkungan kantor 6 Unit / Tahun x 9.750.000									
	6	0	0	2.09	000		2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	510.591.350	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5 Unit	PAD	DINAS SOSIAL			
								Pekerjaan Pendahuluan		20.000.000							
								Pekerjaan Beton Struktur		50.000.000							
								Pekerjaan Lantai Dinding		125.000.000							
								Pekerjaan Plafon		50.000.000							
								Pekerjaan Kusen, Pintu, Jendela		30.000.000							
								Pasang Kunci, Engsel dan Tralis		25.000.000							
								Pekerjaan Instalasi Listrik		25.000.000							
								Pekerjaan Pengecatan		40.000.000							
								Pekerjaan Lain Lain		45.591.350							
								Pekerjaan Pengecoran		100.000.000							
	6	0	0	2.09	001		3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	90.000.000	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8 Unit	PAD	DINAS SOSIAL			
								cat (90 Kg, 1 Kg x Rp. 80.550)		7.249.500							
								Kuas Cat Spesifikasi : Uk. 4 Inch (20		363.000							

								Buah, 1 Buah x Rp. 18.150)									
								Minyak cat/tiner B Spesifikasi : - (20 Liter, 1 Liter x Rp. 32.250)		645.000							
								Detergen Spesifikasi : Sedang (980 Bungkus, 1 Bungkus x Rp. 4.575)		4.484.000							
								Shampoo Spesifikasi : Kecil (80 Botol, 1 Botol x Rp. 33.900)		2.712.000							
								Pembersih Kaca Spesifikasi : Isi 440 Ml (32 Botol, 1 Botol x Rp. 13.900)		514.300							
								Cairan pencuci piring (55 Bungkus, 1 Bungkus x Rp. 41.000)		2.255.000							
								Kain Pel Spesifikasi : Biru (30 Buah, 1 Buah x Rp. 41.650)		1.249.500							
								kapur barus (50 Buah x Rp. 26.100)		1.305.000							
								Keset Spesifikasi : Kain (90 Pcs, 1 Pcs x Rp. 14.350)		1.291.250							
								Pasta Gigi Spesifikasi : besar (50 pcs, 1 pcs x 43.300))		2.165.000							

								Pembersih Lantai Spesifikasi : Sedang (61 Pcs, 1 Pcs x Rp. 29.150)		1.778.150							
								Refill Pengharum Ruangan Spray Spesifikasi : Bahan/Alat Kebersihan (22 Botol x Rp. 93.800)		2.063.600							
								Sabun Cair Spesifikasi : Sedang (88 Botol, 1 Botol x Rp. 40.550)		3.568.400							
								Sabun Batangan Spesifikasi : 80 Gram (110 Buah, 1 Buah x Rp. 4.900)		539.000							
								Sapu Ijuk Spesifikasi : Dalam Ruangan (30 Buah, 1 Buah x Rp. 59.800)		1.435.200							
								Sapu Lidi Spesifikasi : Luar Ruangan (25 Buah, 1 Buah x Rp. 52.750)		1.266.000							
								Sikat Spesifikasi : Gigi (55 Buah, 1 Buah x Rp. 39700)		1.985.000							
								Tempat Sampah Spesifikasi : Ruangan (20 Buah, 1 Buah x Rp. 77.500)		1.085.000							
								Lampu Bolam LED Spesifikasi : 14 Watt (36		3.418.200							

							Buah, 1 Buah x Rp. 94.950)								
							Tukang Spesifikasi : Lokal, WNI, Per Hari 7 Jam Kerja (Tukang Biasa/Ba... (50 Orang/Hari, 1 Orang/Hari x Rp. 160.300)		8.015.000						
							Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : AC Spliit (20 Unit/Tahun, 1 Unit/Tahun x Rp. 610.000)		12.200.000						
							Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Personal Computer/Notebook (20 Unit/Tahun, 1 Unit/Tahun x Rp. 730.000)		14.600.000						
							Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Printer (20 Unit/Tahun, 1 Unit/Tahun x Rp. 690.000)		13.800.000						
							Pembulatan		12.900						
	6	06	02				Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial aktif	228.131.319		65%	DAU	DINAS SOSIAL		Mendukung Program Bupati PEDULI PPKS dan MILENIAL KREATIF

	6	0	0	2.03		1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan sertifikat	194.510.360		68 Orang, 67 Lembaga	DAU	DINAS SOSIAL		
	6	0	0	2.03	000 1	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya (orang)	194.510.360	Meningkatnya kapasitas SDM Pekerja Sosial Masyarakat dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam penyelenggaraa n kesejahteraan sosial	68 Orang	DAU	DINAS SOSIAL		
							Rincian :								
							Air Mineral Spesifikasi : Kemasan Botol 330 MI (7 Dos x 87.750,00)		614.250						
							Biaya Konsumsi (Makan) Spesifikasi : - 30 Kotak x 30.000,00		900.000						
							Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) Spesifikasi : - 30 Kotak x 20.000,00		600.000						
							Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala		1.400.000						

								216 Orang / Hari x 500.000,00										
								Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon II.b (2 Orang / Hari x 400.000,00)		800.000								
								Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Pengawas Pemerintahan Madya/Aud... (3 Orang / Hari x 375.000,00)		1.125.000								
								Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Pengawas Pemerintahan Muda/Audit...(3 Orang / Hari x 350.000,00)		1.050.000								
								Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon V dan Fungsional Umum Golongan IV/I...(4 Orang / Hari x 325.000,00)		1.300.000								
								Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon II.b (2 Orang / Hari x 400.000,00)		800.000								
								Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Pengawas Pemerintahan Madya/Aud...(3 Orang / Hari x 375.000,00)		1.125.000								
								Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon		350.000								

								Tas Pelatihan Spesifikasi : Model Ransel 55 Buah x276.400,00		15.202.000						
								Biaya Konsumsi (Makan) Spesifikasi : 65 x 2 Kotak Kali x 30.000,00		3.900.000						
								Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) Spesifikasi : 65 x 2 Kotak Kali x 20.000,00		2.600.000						
	6	0	0					Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial aktif	33.620.959		65%	DAU	DINAS SOSIAL		Mendukung Program Bupati PEDULI PPKS dan MILENIAL KREATIF
	6	0	0	2.03		1		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PPKS yang mendapatkan fasilitasi pengembangan usaha	33.620.959		%	DAU	DINAS SOSIAL		
	6	0	0	2.03	0004	2		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	33.620.959	Terlaksananya pemberian bantuan sosial dan layanan sosial bagi LKS dan Karang Taruna	90 Lembaga	DAU	DINAS SOSIAL		
								Rincian :								

								Bahan Bakar Spesifikasi : Pertamax (143 Liter X 18.900,00)		2.702.700						
								Karbon Spesifikasi : Pembulatan (359 Lembar X 1,00)		359						
								Banner Spesifikasi : Bahan Fronlite 340 Gr (10M2 X 52.350,00)		523.500						
								Banner Spesifikasi : Bahan Fronlite 340 Gr (10 M2 X 52.350,00)		523.500						
								Photo Copy Spesifikasi : Folio/hvs (986Lembar X 400,00)		Rp394.400,00						
								Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) Spesifikasi : - (100 Kotak X 20.000,00)		Rp2.000.000,00						
								Air Mineral Spesifikasi : Kemasan Botol 330 MI (6 Dos X 87.750,00)		Rp526.500,00						
								Biaya Konsumsi (Makan) Spesifikasi : - (100 Kotak x 30.000,00)		Rp3.000.000,00						
								Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /Yang Disetarakan		Rp1.000.000,00						

							(intern Perang... (2 Orang / Jam X 500.000,00)								
							Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon IV kebawah /yang disetarakan (4 Orang / Jam X 800.000,00)		Rp3.200.000,00						
							Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana Diatas Rp. 100 Juta S.D Rp. 250 Ju...(5 Orang / Bulan X 1.210.000,00)		Rp6.050.000,00						
							Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Pengawas Pemerintahan Muda/Audit... (3 Orang / Hari X 350.000,00)		Rp1.050.000,00						
							Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon V dan Fungsional Umum Golongan IV/I... (1 Orang / Hari X 325.000,00)		Rp325.000,00						

							Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Pengawas Pemerintahan Madya/Aud...(1 Orang / Hari X 375.000,00)		Rp375.000,00							
							Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon II.b (1Orang / Hari X 400.000,00)		Rp400.000,00							
							Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Fungsional Umum Non Pegawai Negeri Sipil (1 Orang / Hari X 250.000,00)		Rp250.000,00							
							Uang harian Spesifikasi : Bantuan transport peserta (90 Orang / Kali X 100.000,00)		Rp9.000.000,00							
							Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota Spesifikasi : Full Day/Half Day (23 Orang / Hari X 100.000,00)		Rp2.300.000,00							

	6	0	0			Program Rehabilitasi Sosial		Persentase PPKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial yang sesuai standar	1.843.036.300		45%	DAU	DINAS SOSIAL		Mendukung SPM dan Program Bupati PEDULI PPKS
	6	0	0	2.01		1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	1.643.435.150		978 Orang	DAU	DINAS SOSIAL		
	6	0	0	2.01	0001	1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota	700.000.000	Permakanan Lansia 50 Org (566.300.000), Anak LKSA Beras 133.700.000	750 Orang	DAU	DINAS SOSIAL		
							Rincian :								
							Pengisin Tabung Gas 3 kg 480 Tabung x Rp 39.000,-		18.720.000						
							Photo Copy 1952 Lembar x Rp. 400,-		780.800						

								Air Mineral 360 Galon x Rp.25.650,-		9.234.000						
								Bawang Putih 180 Kg x Rp. 45.300,-		8.154.000						
								Bayam 120 Ikat x Rp. 4.200,-		504.000						
								Beras 4.800 Kg x Rp. 19.100,-		91.680.000						
								Bihun Jagung 48 Kg x Rp. 33.400,-		1.603.200						
								Cabe Iji Ale 120 Bungkus x Rp. 7.200,-		864.000						
								Cabe Kecil 60 Kg x Rp. 71.400		4.284.000						
								Daging Ayam 240 x Rp. 50.100		12.024.000						
								Daging Sapi 240 x Rp. 198.500,-		47.640.000						
								Daun Brambang 12 Kg x Rp. 50.800,-		609.600						
								Daun Kemangi 24 Ikat x Rp. 6.800,-		163.200						
								Daun Pisang 60 Ikat x Rp. 33.100,-		1.986.000						
								Daun Prei 12 Kg x Rp. 41.750,-		501.000						
								Daun Sledri 12 Kg x Rp. 35.800,-		429.600						
								Gambas 120 Kg x Rp. 33.100,-		3.972.000						
								Garam Halus 24 Bungkus x Rp. 5.950,-		1.428.000						

								Gobis 240 Kg x Rp. 17.900,-		4.296.000						
								Gula Pasir 1000 Kg x Rp. 17.350,-		17.350.000						
								Ikan Air Tawar 240 Kg x Rp. 53.650,-		12.876.000						
								Jagung Dadaran 240 Kg x Rp. 15.450,-		3.708.000						
								Jahe 36 Kg x Rp. 25.050,-		901.800						
								Kacang Hijau 36 Kg x Rp. 38.150,-		1.373.400						
								Kacang Panjang 120 g x Rp. 21.500,-		2.580.000						
								Kacang Tanah 36 Kg x Rp. 32200,-		1.159.200						
								Kangkung 120 Ikat x Rp. 4.300,-		516.000						
								Kecap 240 Botol x Rp. 26.550,-		6.372.000						
								Kelapa Parut 240 Butir x Rp. 19.700,-		4.728.000						
								Kemiri 36 Kg x Rp. 77.500,-		2.790.000						
								Kencur 24 Kg x Rp. 41.750,-		1.002.000						
								Kentang 240 Kg x Rp. 26.250,-		6.300.000						
								Ketumbar 12 Kg x Rp. 33.400,-		400.800						
								Kopi Hitam Arabika 60 Kg x Rp. 136.400,-		8.184.000						
								Krai 120 Kg x Rp. 14.350,-		1.722.000						

								Kunir 12 Kg x Rp. 61.950,-		743.400						
								Lombok Merah 120 Kg x Rp. 50.700,-		6.084.000						
								Manisa 240 Kg x Rp. 14.350,-		3.444.000						
								Mentimun 120 Kg x Rp. 20.450,-		2.454.000						
								Merica 12 Kg x Rp. 171.300,-		2.055.600						
								Mie Telor 24 Dos x Rp. 107.300,-		2.575.200						
								Minyak Goreng 2 Ltr 730 Pcs x Rp. 56.400,-		41.172.000						
								Pepaya 480 Kg x Rp. 17.900,-		8.592.000						
								Sawi Hijau 120 Ikat x Rp. 3.150,-		378.000						
								Sawi Putih 120 Ikat x Rp. 13.800,-		1.656.000						
								Snack 360 Per Kotak x Rp. 91.250,-		32.850.000						
								Susu Kental Manis 1000 Kaleng x Rp. 14.000,-		14.000.000						
								Tahu 7.800 Biji x Rp. 4.800,-		37.440.000						
								Tauge Pendek 24 Kg x Rp. 529.500,-		1.270.800						
								Tauge Panjang 36 Kg x Rp. 37.600,-		1.353.600						
								Teh Celup 84 Kotak x Rp. 13.150,-		1.104.600						

								Telur Ayam 120 Kg x Rp. 36.150,-		4.338.000							
								Tempe 1.800 Kotak x Rp. 8.350,-		15.030.000							
								Bawang Merah 240 Kg x Rp. 53.650,-		12.876.000							
								Tepung Terigu 24 Kg x Rp. 20.300,-		487.200							
								Terasi Udang 36 Sachet x Rp. 12.250,-		441.000							
								Terong 120 Kg x Rp. 14.350,-		1.722.000							
								Tomat 120 Kg x Rp. 28.650,-		3.438.000							
								Tongkol Pindang 240 Kg x Rp. 127.600,-		30.624.000							
								Udang 240 Kg x Rp. 101.400,-		24.336.000							
								Wortel 120 Kg x Rp. 21.500,-		2.580.000							
								Pisang Raja 480 Kg x Rp. 41.750,-		20.040.000							
								Buncis 120 Kg x Rp. 22.650,-		2.718.000							
								Honorarium Pengelola Keuangan (PPTK) 6 Bulan x Rp.1.610.000,-		9.660.000							
								Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat beras 700 anak x 10 Kg x Rp. 19.100,-		133.700.000							

	6	0	0	2.01	000		2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten / Kota	196.346.600	Penyediaan sandang bagi penghuni UPT	50 Orang	DAU	DINAS SOSIAL		
								Rincian :								
								Foto Copy 1.524 Lembar x Rp. 400,-		609.600						
								Masker 12 Box x Rp. 29.600,-		355.200						
								Underpad 60 Pak x Rp. 49.950,-		2.997.000						
								Hand Scoon 60 Box x Rp. 73.300		4.398.000						
								Perlengkapan Jenazah 20 Set x Rp. 295.300,-		5.906.000						
								Popok Dewasa 968 Pack x Rp. 188.100,-		182.080.800						
	6	0	0	2.01	000		3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan	196.152.400	Pemberian alat bantu kursi roda bagi penyandang disabilitas	53 Orang	DAU	DINAS SOSIAL		

									Kabupaten / Kota								
									Rincian :								
									Narasumber/ Pembahas Eselon II (intern) 2 Orang/Jam x Rp 800.000		1.000.000						
									Narasumber/Pembahas Eselon IV 5 Orang/Jam x Rp 400.000		4.000.000						
									Photo Copy 1364 Lembar x Rp. 400		48.400						
									Banner 8 M/2 x Rp 52.350		209.400						
									Belanja Natura dan Pakan Natura		5.266.050						
									Snack 80 Kotak x Rp. 20.000		1.600.000						
									Air Mineral 5 Dos x Rp. 87.750		438.750						
									Nasi Kotak 80 Kotak x Rp. 30.000		2.400.000						
									Dandang 10 x Rp 277.500		2.775.000						
									Kompas Gas 10 Dos x Rp 599.400		5.994.000						
									Mixer 10 Dos x Rp 249.800		2.498.000						
									Oven 10 Dos x Rp 457.600		4.576.000						
									Tabung Gas 10 Dos x Rp 288.600		2.886.000						

								Uang Harian Pertemuan Di Luar Kantor - Dalam Kota 175 Orang x Rp. 100.000		17.500.000							
								Uang Transpot Peserta 50 Orang/Hari x Rp 100.000		5.000.000							
								Belanja Banmas Kursi Roda 43 Unit x Rp 3.254.000		139.960.700							
								Pembulatan		100							
	6	0	0	2.01	000		4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.000	Mempertemuk n kembali keluarga yang hilang	15 Orang	DAU	DINAS SOSIAL			
								Rincian :									
								Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur 8 Orang ASN Pejabat Eselon III x Rp. 375.000		2.600.000							
								Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur 8 Orang ASN Pejabat Eselon V x Rp. 325.000		3.000.000							
								Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur 8 Orang Non ASN x Rp. 250.000		2.000.000							
								Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam		7.400.000							

								Kota 74 Orang x Rp. 100.000									
	6	6	4	02.0 1	5	5		Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota	450.000.000	Terlaksananya pemberian honorarium bagi THL di UPT PPKS Majapahit	50 Orang	DAU	DINAS SOSIAL			
								Rincian :									
								Pengisian Bahan Bakar (BBM) 1.000 Liter x Rp. 18.900		18.900.000							
								Foto Copy 887 Lembar x Rp. 400		354.800							
								Jasa Tenaga Medis 4 Orang x 12 Bulan x Rp. 1.500.000		72.000.000							
								Jasa Tenaga Perawat Klien 5 Orang x 12 Bulan x Rp. 1.500.000		90.000.000							
								Jasa Tenaga Kebersihan 3 Orang x 12 Bulan x Rp. 1.500.000		54.000.000							
								Jasa Tenaga Keamanan 4 Orang x 12 Bulan x 1.500.000		72.000.000							
								Jasa Tenaga Juru Masak 3 Orang x 12 Bulan x 1.500.000		54.000.000							

							Jasa Tenaga Supir 1 Orang x 12 Bulan x 1,500.000		18.000.000							
							Jasa Tenaga Administrasi 2 Orang x 12 Bulan x Rp. 1.277.040		30.648.960							
							Jasa Tenaga Sarana dan Prasarana Umum (Tukang) 5 Orang x 24 Hari x Rp. 160.300		19.236.000							
							Jasa Tenaga Penceramah Agama 1 Orang x 12 Bulan x Rp. 500.000,-		6.000.000							
							Uang Harian Pertemuan (fulday/halfday) 64 Orang x Rp. 100.000,-		6.400.000							
							Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6 Bulan x 1.410.000		8.460.000							
							Pembulatan		240							
	6	0	0	2.01	000	6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan	4.030.300	Terlaksananya assesment bagi PPKS	10 Orang	DAU	DINAS SOSIAL			

								Uang Harian Pertemuan Di Luar Kantor - Dalam Kota 44 Orang x Rp. 100.000		4.400.000						
								Pembulatan		200						
	6	0	0	2.01	000		8	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	11.255.000	Terlaksananya pemberian layanan sosial bagi PPKS	15 Orang	DAU	DINAS SOSIAL		
								Rincian :								
								Photo Copy 137 Lembar x Rp. 400		54.800						
								Uang Harian Pertemuan Di Luar Kantor - Dalam Kota 112 Orang x Rp. 100.000		11.200.000						
								Pembulatan		200						
	6	0	0	2.01	001		9	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten / Kota	66.248.250	Terlaksananya pemberian layanan sosial bagi PPKS	20 Orang	DAU	DINAS SOSIAL		
								Rincian :								
								Bahan Bakar Pertamax 500 Liter x 18.900		9.450.000						
								Photo Copy 171 Lembar x Rp. 400		68.400						

								Jasa Tukang 32 Orang/Hari x 160.300		5.129.600						
								Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur 30 Orang ASN Pejabat Eselon III x Rp. 375.000		11.250.000						
								Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur 30 Orang ASN Pejabat Eselon V x Rp. 325.000		9.750.000						
								Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur 30 Orang Non ASN x Rp. 250.000		7.500.000						
								Uang Harian Pertemuan Di Luar Kantor - Dalam Kota 232 Orang x Rp. 100.000		23.100.000						
								Pembulatan		250						
	6	0	0	2.02		2		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	199.601.150		211 Orang	DAU	DINAS SOSIAL		
	6	0	0	2.02	000 3	1		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan	195.296.900	Terwujudnya pemberian bantuan permakanan bagi penderita eks kusta di Sumber Glagah	196 Orang	DAU	DINAS SOSIAL		

									Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota								
									Rincian :								
									Belanja Honorarium PPTK 6 Orang/Bulan x Rp. 1.210.000		7.260.000						
									Photo Copy 779 Lembar x Rp. 400		311.600						
									Banner 4 M/2 x Rp 52.350		209.400						
									Minyak Goreng 196 Liter x Rp 56.400		11.054.400						
									Kecap 588 Botol x Rp 26.550		15.611.400						
									Mie Instan 392 Dos x Rp 155.000		60.760.000						
									Beras 4900 Kg x Rp 19.100		93.590.000						
									Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota 65Orang x Rp. 100.000		6.500.000						
									Pembulatan		100						

		6	0	0	2.02	000		2	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan / atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV / AIDS Kewenangan Kabupaten / Kota	4.304.250	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	DAU	DINAS SOSIAL		
									Rincian :								
									Photo Copy 10 Lembar x Rp. 400		4.000						
									Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota 43 Orang x Rp. 100.000		4.300.000						
									Pembulatan		250						

	6	0	0					Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Desa yang updating SIKS-NG	7.774.415.740		55%	DAU	DINAS SOSIAL		Mendukung Program Bupati PEDULI PPKS, PEREMPUAN BERKARYA, dan GERCEP STUNTING
	6	0	0	2.02		1		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data kesejahteraan sosial yang terverifikasi dan tervalidasi sesuai standar	7.726.580.740		1.979.000 Keluarga, 20 Orang	DAU	DINAS SOSIAL		
	6	0	0	2.02	0002	1		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten / Kota	142.737.240	Pendataan PPKS-PSKS dan DTKS	215.000 Keluarga	DAU	DINAS SOSIAL		
								Rincian :								
								Rincian :								
								DTKS								
								Photo Copy 2.114 Lembar x Rp. 400		845.600						
								Snack Mamin 370 Kotak x Rp. 20.000		7.400.000						
								Honor Narsum Eselon II 8 O/J x Rp. 500.000		4.000.000						

								Photo Copy 2.183 Lembar x Rp. 400		873.200							
								Snack Mamin 65 Kotak x Rp. 20.000		1.300.000							
								Honor Narsum Eselon II 2 O/J x Rp. 500.000		1.000.000							
								Honor Narsum Eselon III 2 O/J x Rp. 450.000		900.000							
								Uang Harian Luar Kota Dalam Prov. Jatim Non ASN 5 O/H x Rp. 250.000		1.250.000							
								Uang Harian Luar Kota Dalam Prov. Jatim Pejabat Eselon II.b 2 O/H x Rp. 400.000		800.000							
								Uang Harian Luar Kota Dalam Prov. Jatim Pejabat Eselon III 6 O/H x Rp. 375.000		2.250.000							
								Uang Harian Luar Kota Dalam Prov. Jatim Pejabat Eselon V 8 O/H x Rp. 350.000		2.800.000							
								Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota 76 Orang x Rp. 100.000		7.600.000							
								Uang Harian - Bantuan Transport 38 Orang x Rp. 100.000		3.800.000							

	6	0	0	2.02	000		2	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	7.583.843.500	Pemberian bansos bagi DBKCHT, PKH, Sembako (BPNT)	1.764.000 Keluarga	DAU	DINAS SOSIAL		
								Rincian :								
								DBHCHT								
								Photo Copy 12.236 Lembar x Rp. 400		4.894.400						
								Materai 55 Lembar x Rp. 14.400		792.000						
								Snack Mamin 1.000 Kotak x Rp. 20.000		20.000.000						
								Mamin Rapat 1.000 Kotak x Rp. 30.000		30.000.000						
								Honor Narsum Kepala Daerah 6 O/J x Rp. 1.400.000		8.400.000						
								Honor Narsum Eselon III 9 O/J x Rp. 900.000		8.100.000						
								Honor Narsum Eselon IV 40 O/J x Rp. 400.000		16.000.000						
								Wesel 5.950 Orang x Rp. 15.000		89.250.000						

								Pemuatan Iklan 7x 80 Mmk 1 Tayang x Rp. 10.151.700		10.151.700						
								Pemuatan Iklan 7x 130 Mmk 5 Tayang x Rp. 2.137.200		10.686.000						
								Berita Advetorial Mmedia Sosial/Cyber 1 Tayang x Rp. 2.671.500		2.671.500						
								Sewa Mini Bus Haice 1 Unit x Rp. 2.274.500		2.274.500						
								Penginapan Luar Kota Dalam Prov. Jatim Non ASN 5 O/H x Rp. 300.000		1.500.000						
								Penginapan Luar Kota Dalam Prov. Jatim Pejabat Eselon II 1 O/H x Rp. 1.605.000		1.605.000						
								Penginapan Luar Kota Dalam Prov. Jatim Pejabat Eselon III 2 O/H x Rp. 1.076.000		2.152.000						
								Penginapan Luar Kota Dalam Prov. Jatim Pejabat Eselon IV 2 O/H x Rp. 664.000		1.328.000						
								Uang Harian Luar Kota Dalam Prov. Jatim Non ASN 15 O/H x Rp. 250.000		3.750.000						
								Uang Harian Luar Kota Dalam Prov. Jatim Pejabat		2.000.000						

							Uang Harian Luar Kota Dalam Prov. Jatim Pejabat Eselon II.b 1 O/H x Rp. 400.000		400.000						
							Uang Harian Luar Kota Dalam Prov. Jatim Pejabat Eselon III 3 O/H x Rp. 375.000		1.125.000						
							Uang Harian Luar Kota Dalam Prov. Jatim Pejabat Eselon IV 3 O/H x Rp. 350.000		1.050.000						
							Uang Harian Luar Kota Dalam Prov. Jatim Non ASN 4 O/H x Rp. 250.000		1.000.000						
							Uang Harian Kegiatan Rapat fullday/halfday 45 O/H x 100.000		4.500.000						
							Uang Harian - Bantuan Transport 1.320 O/K x Rp. 100.000		132.000.000						
	6	06	05				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima bansos yang memiliki embrio usaha	47.835.000		55%	DAU	DINAS SOSIAL		Mendukung Program Bupati PEDULI PPKS, PEREMPUAN BERKARYA, dan GERCEP STUNTING

	6	0	0	2.02		1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PPKS yang berwirausaha mandiri	47.835.000		1.979.000 Keluarga, 20 Orang	DAU	DINAS SOSIAL		
	6	0	0	2.02	0004	3	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	47.835.000	Pemberian bansos bagi pokmas	215.000 Keluarga	DAU	DINAS SOSIAL		
							Rincian :								
							Banner Promkes 6 M2 X Rp. 64.200		385.200						
							Photo Copy 1207 lembar x Rp. 400		482.800						
							Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor-Dalam Kota 90 orang X Rp. 100.000,-		9.000.000						
							Bantuan Sosial Uang Kepada KPM PKH 20 Orang		37.900.000						
							pembulatan		67.000						
	6	0	0				Program Penanganan Bencana	Persentase kejadian bencana yang ditangani sesuai standar tanggap darurat	198.091.600		50%	DAU	DINAS SOSIAL		Mendukung SPM dan Program Bupati PEDULI PPKS
	6	0	0	2.01		1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase PPKS korban bencana yang terpenuhi	170.000.000		10.000 Orang	DAU	DINAS SOSIAL		

								kebutuhan dasarnya pada masa bencana sesuai standar								
	6	0	0	2.01	000	1	1	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari Dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten / Kota	150.000.000	Penyediaan permakanan bagi korban bencana alam dan sosial	10.000 Orang	DAU	DINAS SOSIAL		
								Rincian :								
								Penisian Tabung Lpg 12 Kg 60 Tabung x Rp. 294.200,-		17.652.000						
								Beras 2.500 Kg x Rp. 19.100,-		47.750.000						
								Mie Instan 200 Dos x Rp. 181.650,-		36.330.000						
								Minyak Goreng 240 pcs x Rp. 56 400,-		13.536.000						
								Telur 60 Kg x Rp. 36.150,-		2.169.000						
								Daging Ayam 60 Kg x Rp. 50.100		3.006.000						
								Tahu 1500 Biji x Rp. 4.800,-		7.200.000						
								Tempe 590 Papan x Rp. 8.350,-		4.926.500						

								Kecap 240 Botol x Rp. 34.600		8.304.000						
								Bawang Putih 24 Kg x Rp. 45.300,-		1.087.200						
								Bawang Merah 60 x Rp. 53.650		3.219.000						
								Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor-Dalam Kota 48 orang X Rp. 100.000,-		4.800.000						
								Pembulatan		20.300						
	6	0	0	2.01	000	2		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia Pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota	10.000.000	Penyediaan sandang bagi korban bencana alam dan sosial	10.000 Orang	DAU	DINAS SOSIAL		
								Foto Copy 1045 Lembar x Rp. 400,-		418.000						
								Selimut 50 Buah x Rp. 160.000,-		8.000.000						
								Tisu Basah 20 Pack x Rp. 39.100		782.000						

								Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota half day- fullday 8 Orang x Rp. 100.000,-		800.000						
	6	0	0	2.01	000	5	3	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/ Kota	10.000.000	Dukungan psikososial bagi korban bencana alam dan sosial	10.000 Orang	DAU	DINAS SOSIAL		
								Rincian :								
								belanja BahanBakar minyak dan pelumas (Solar non subsidi 155 liter x 25750		3.991.250						
								Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota half day- fullday 60 Orang x Rp. 100.000,-		6.000.000						
								pembulatan		8.750						
	6	0	0					Program Penanganan Bencana	Persentase kejadian bencana yang ditangani sesuai standar tanggap darurat	28.799.600		50%	DAU	DINAS SOSIAL		Mendukung SPM dan Program Bupati PEDULI PPKS

	6	0	0	2.01		1	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan sertifikat	28.091.600		%	DAU	DINAS SOSIAL		
	6	0	0	2.01	000 2	1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	28.091.600	Peningkatan kemampuan dan ketrampilan TAGANA dalam penanganan bencana	46 Orang	DAU	DINAS SOSIAL		
							Rincian :								
							Benner 8 M2 x Rp.52.350		418.800						
							Foto Copy 1.182 Lembar x Rp. 400		472.800						
							Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon Ilyang Disetarakan (internal) 1 Orang x Rp. 500.000		500.000						
							Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon III yang Disetarakan (internal) 1 Orang x Rp. 450.000		450.000						
							Narasumber/ Pembahas Pejabat Eselon IV yang		400.000						

[illegible]

							Bantuan Transport Peserta Kegiatan 48 Orang x Rp. 100.000		4.800.000						
	6	0	0				Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	15.000.000		100%	DAU	DINAS SOSIAL		
	6	0	0	2.01		1	Pemeeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten / Kota	15.000.000		6 Makam	DAU	DINAS SOSIAL		
	6	0	0	2.01	000 2	1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah Taman Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/ Kota	15.000.000	Terlaksananya pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	6 Makam	DAU	DINAS SOSIAL		
							Rincian :								
							Cat Tembok 5 Kg 20 Galon (1 Galon x Rp. 174.500)		3.490.000						
							Kuas Cat 20 Buah (1 Buah x Rp. 26.000)		520.000						

								Kapi Cat 10 Buah (1 Buah x Rp. 15.000)		150.000						
								Cikrak 12 Buah (1 Buah x Rp. 35.000)		420.000						
								Sapu Ijuk 10 Buah (1 Buah x Rp. 37.000)		370.000						
								Sapu Lidi 12 Buah (1 Buah x Rp. 28.500)		342.000						
								Timba 12 Buah (1 Buah x Rp. 59.000)		708.000						
								Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 60 Orang/Hari (1 Orang x Rp. 100.000)		6.000.000						
								Banja Perjalanan Dinas Biasa 30 Orang (1 Orang x Rp. 100.000)		3.000.000						

BAB V

PENUTUP

4.3. Catatan Penting Dalam Penyusunan Rencana Renja

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program, kegiatan dan sub. kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Review Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2026 ini harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut dilakukan guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan/sub. kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial, baik dalam kerangka regulasi, antara kegiatan satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub. kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses koordinasi antar pelaku pembangunan dibawah lingkup Dinas Sosial, agar program/kegiatan/sub. kegiatan menjadi terintegrasi, baik antar kegiatan, program maupun sektor.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dimanfaatkan antara lain melalui forum musyawarah koordinasi perencanaan, seperti Musrenbang ditingkat Desa, Musrenbang Kecamatan ditingkat Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten ditingkat Kabupaten.

4.4. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan telah terbitnya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Di dalam Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2026 Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi Jawa Timur maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan / mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten Mojokerto, RPJMD Kabupaten Mojokerto, RKPD Kabupaten Mojokerto dan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto.

4.5. Rencana Tindak Lanjut

1. Di dalam Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
2. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 sudah sesuai dengan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026.

Untuk mewujudkan semua yang telah direncanakan dan dijabarkan dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Sosial diatas, dengan tekad mensukseskan pembangunan di Kabupaten Mojokerto serta adanya dukungan dari semua pihak, kami percaya dapat menyelesaikan tugas yang dibebankan dipundak kami. Sebagai manusia kami tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan, untuk itu sumbang saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan.

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud pada Tahun 2026 yang akan datang.

Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto adalah dalam rangka mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah diselaraskan dengan visi Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Mojokerto



Try Raharjo Murdianto, S.STP., M.AP.
Pembina Tk. I
NIP. 19870519 200602 1 002